

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
SEKTOR EKONOMI BIDANG USAHA KECIL
PADA PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS

Diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Hj. Suci Hartati, SH.

NIM : B.002.0038

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

UPT-PUSTAK-UNDIP

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
SEKTOR EKONOMI BIDANG USAHA KECIL
PADA PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
DI KABUPATEN TEGAL**

Disusun oleh :
Suci Hartati
NIM : B.002.93.0038

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 214/T/01/01
Tgl. : 1 Oct 03

Dipertahankan di hadapan Dosen Penguji pada tanggal
26 September 2002

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk
Memperoleh gelar Magister Hukum

Pembimbing

Mengetahui

DR. Moempoeni Martojo, SH
NIP. 130.324.140

Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130.350.519

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUD'UL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	4
C. Kerangka teoritik	5
D. Tujuan penelitian	11
E. Kontribusi penelitian	11
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika penelitian	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemahaman tentang kebijaksanaan pemerintah	21
B. Sasaran Kebijakan Dalam Pembangunan Ekonomi.	24
C. Pembinaan Pengusaha Kecil Dalam Kelompok HAN	26
D. Implementasi kebijaksanaan Pemerintah	31
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	39
A. Diskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Tegal	39

B. Pola Pengembangan dan Peraturan yang mengatur Pembinaan Pengusaha Kecil

1. Pola Pengembangan Industri di Indonesia	48
3. Pola Pengembangan Industri di Jawa Tengah	56
4. Pola Pengembangan Industri di Kabupaten Tegal	62

C. Implementasi kebijaksanaan Pemerintah 80

BABIV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dengan berbekal pengetahuan dan semangat yang ada serta atas bimbingan moril maupun spirituil dari berbagai pihak maka tersusunlah tesis ini yang mana dengan berbagai pertimbangan dan tahapan-tahapan yang telah penyusun lalui, mulai dari persiapan penulisan sampai penyelesaian akhir tesis dengan judul:

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Sektor Ekonomi
Bidang Industri Kecil Pada Pembinaan Industri Kecil di
Kabupaten Tegal.**

Kendati tesis ini telah merupakan hasil maksimal, namun kekurangan-kekurangan masih ada, bahkan jauh dari sempurna, hal ini semata-mata terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penyusun. Selanjutnya kritik dan saran penyusun harapkan baik dari pembaca serta khusus kepada para dosen pembimbing dan senior, penyusun mohon kritik dan bimbingannya.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang turut serta membantu, membimbing serta memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

2. Prof. Soehardjo, Ss, SH (almarhum) selaku dosen Pembimbing.
3. DR. Moempoeni M. Martoyo, SH selaku dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan memberikan petunjuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Para Pejabat-pejabat Instansi terkait yang telah memberikan data dan keterangan-keterangan yang dapat mendukung selesainya tesis ini.
5. Semua pihak yang telah ikut memberikan dukungan data dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ayah, Ibu, Suami dan anak-anak tercinta yang telah ikut memberikan dorongan, bantuan, semangat hingga terselesaikannya tesis ini

Semoga kebaikannya akan mendapat limpahan Rahmat, Hidayah serta Inayah dari Allah Subhanahu Wa ta'ala sebagai balasannya, Amin yaa Robbil 'Alamin.

Tegal, 2002

Penulis

Suci Hartati.

ABSTRACT

This research, which implemented from government policies at economic sector; destined for the growing of small industries to achieve their prosperity.

This research, however, scope directly on how far our government efforts to build the small industries, with their arrangement or other possible methods, exactly as the region needed.

The implementation mentioned above built and developed by small industries which now become a big enough part of our nation's essential economy bases. The small industries now become a part that must be first prioritized, at both at opportunity and occasion. Small industry is indeed a vast component, judging from its variety and quality.

The inspection of small industry mentioned above destined directly to government's help, from human resources as well as effort of 3 components; government, producer, and the society themselves.

The aims of governmental policy are focused in three aspects, policy as a program, policy as an output and policy as an ultimate goal, which related in governmental arrangement and decisions form as an effort to reach a common goal with common target in the development of small industries.

The effort that use is a governmental legal acts in the form of governmental arrangement in real term, especially small industries environment in Kabupaten Tegal.

The implementation this policies as a ultimate goal will be seen in investigation how much the aims of goals materialized which are :

1. The development of small industries.
2. Good and dependable small business and industries will be excited and capable to increasing their skill in human resources aspect, managerial factors and friendship relation.
3. The development of labour source and increase new labour source.

ABSTRAKSI

Penelitian ini merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah pada sector ekonomi yang ditujukan pada pertumbuhan industri kecil untuk mencapai tujuan-tujuan seperti apa yang diharapkan, yang mana ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh usaha-usaha Pemerintah untuk membina industri kecil dengan peraturan-peraturan tertentu atau peraturan atau kebijakan yang lain yang disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

Implementasi kebijakan tersebut diatas dibuat dan dikembangkan untuk bagaimana industri kecil dapat berkembang menjadi industri menengah, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi suatu Negara pada umumnya. Industri kecil saat ini merupakan bagian yang paling penting dan harus diutamakan pada segala kesempatan. Industri kecil yang beragam dengan jenis usaha yang luas ditinjau dari jenis dan kualitasnya.

Sasaran kebijaksanaan sebagai keluaran serta kebijaksanaan sebagai hasil akhir yang kaitannya pada bentuk peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Pemerintah sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran-sasaran tertentu dalam peningkatan usaha kecil.

Upaya yang dipakai adalah tindakan-tindakan yang sah dari Pemerintah berupa peraturan Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara nyata di Kabupaten Tegal khususnya industri kecil.

Dalam implementasinya kebijakan sebagai hasil akhir akan terlihat pada pengamatan seberapa jauh tujuan itu terlaksana antara lain :

1. Berkembangnya industri-industri kecil.
2. Terwujudnya pengusaha kecil mandiri dan tangguh yang mampu meningkatkan ketrampilan pada aspek sumber daya manusia, factor-faktor manajerial serta hubungan kemitraan.
3. Berkembangnya tenaga kerja yang sudah ada serta bertambahnya tenaga kerja baru.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	4
C. Kerangka teoritik	5
D. Tujuan penelitian	11
E. Kontribusi penelitian	11
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika penelitian	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemahaman tentang kebijaksanaan pemerintah	21
B. Sasaran Kebijakan Dalam Pembangunan Ekonomi.	24
C. Pembinaan Pengusaha Kecil Dalam Kelompok HAN	26
D. Implementasi kebijaksanaan Pemerintah	31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	39
A. Diskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Tegal	39
B. Pola Pengembangan dan Peraturan yang mengatur Pembinaan Pengusaha Kecil	
1. Pola Pengembangan Industri di Indonesia	48
3. Pola Pengembangan Industri di Jawa Tengah	56
4. Pola Pengembangan Industri di Kabupaten Tegal	62
C. Implementasi kebijaksanaan Pemerintah	80
 BABIV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

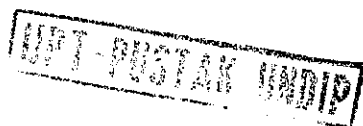
Industrialisasi yang berkembang saat ini telah membuka berbagai kesempatan usaha, baik disektor formal ataupun informal yang keduanya mempunyai peranan yang penting sebagai peserta dalam pembangunan negara khususnya bidang perekonomian.

Pembangunan perekonomian negara secara terencana dan mendasar yang dimulai sejak orde baru, tidak hanya menumbuhkan industri-industri besar, akan tetapi lebih telah banyak menumbuhkan usaha-usaha kecil yang dikelola secara mandiri dan mempunyai kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya.

Sesuai dengan arahan GBHN 1993 sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahap II adalah terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, pembangunan industri, pembangunan industri dilaksanakan atas dasar dukungan sektor pertanian yang kuat diarahkan menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Pembangunan industri kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan industri dan ekonomi nasional baik ditinjau dari peluang berusaha, kesempatan kerja maupun pemerataan lokasi pembangunan industri.

Dalam pembukaan UUD 1945, ditegaskan bahwa Pemerintah Negara RI dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Ini berarti bahwa bangsa Indonesia megharapkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai, yang perwujudannya dilakukan secara bertahap melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Dalam kenyataannya upaya mewujudkan kesejahteraan sosial tidaklah mudah. Salah satu cara adalah menerapkan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu serta sesuai dengan kepribadian dan budaya setempat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh WI Jenks yang memandang :

Kebijaksanaan sebagai “a set of interrelated decission concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation”, yaitu serangkaian keputusan-keputusan yang terkait berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.¹

Kebijakan Pemerintah dalam industri sudah terulang pada berbagai peraturan Perundang-undangan antara lain disebut pada pasal 10 Undang-undang no.5 tahun 1984 tentang Undang-undang Perindustrian sebagai berikut:

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi :

1. Keterkaitan antara bidang-bidang industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional.
2. Keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang industri lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional.
3. Pertumbuhan industri melalui prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat.

Di tinjau dari segi pembinaan, kebijaksanaan pemerintah tersebut secara khusus memprioritaskan pada industri kecil, pembinaan mana dilaksanakan untuk menaikkan nilai tambah serta merangsang tumbuhnya industri-industri kecil secara swadaya.

Industri-industri kecil yang tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan mempunyai tempat tersendiri di dalam sektor ekonomi Indonesia, karena usaha ini dipandang efektif yaitu selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga sebagai penyangga kebutuhan hidup para pengusaha dalam ikut serta memajukan perkembangan industri Pemerintah.

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi sektor informal oleh Keith Hart dicirikan sebagai suatu kegiatan usaha yang bersifat swakarya, yang mendapatkan pendapat dari usaha sendiri. Sedangkan sektor formal dicirikan sebagai pekerjaan upaya atau pendapatan dari gaji.

Kegiatan ekonomi yang digolongkan dalam sektor informal biasanya bergerak dalam bidang :

1. Industri pengolahan
2. Angkutan
3. Bangunan
4. Perdagangan
5. Jasa

Di tinjau dari sudut industri pengolahan, maka bahan-bahan mentah diolah menjadi barang jadi yang bisa dipergunakan oleh konsumen, sehingga barang-barang produksinya dibuat sedemikian rupa untuk siap pakai.

Sebagaimana diketahui tujuan para pengusaha kecil adalah untuk mendapatkan penghasilan dengan transaksi jual-beli yang pelaksanaannya secara sederhana. Hal ini mereka lakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sehari-hari disamping itu

¹ Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, 1990 :22

juga transaksi yang demikian telah dilakukan secara turun temurun dari generasi sebelumnya.

Tingkat pendapatan pengusaha kecil dipengaruhi oleh banyak faktor penunjang keberhasilan usaha yang antara lain adalah modal, tenaga kerja, manajemen administrasi serta teknik perindustrian. Tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan produksinya yaitu dengan mengubah, memperbaiki dan menyesuaikan dengan selera konsumen. Namun demikian budaya terdahulu dengan bentuk-bentuk barang produksi yang tradisional dan khas telah membuat para pengusaha kecil untuk mempertahankan pola tersebut. Di samping itu adanya keinginan untuk mempertahankan tempat usaha yang mereka anggap strategis dan ekonomi. Strategis, karena dari dahulu sampai sekarang mereka menyelenggarakan usahanya di daerah dan di tempat yang sama. Ekonomis, karena lokasi usahanya berada ditempat tinggal sehingga tidak memerlukan lokasi tersendiri yang berpisah.

B. PERMASALAHAN

1. Sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah terhadap pengusaha kecil dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan.
2. Sejauh mana pembinaan bagi Pengusaha Kecil dalam bentuk selain Peraturan Perundang-undangan.
3. Bagaimana Implementasi dari pembinaan Pengusaha Kecil.

C. KERANGKA TEORITIK

Pada umumnya Pengusaha Kecil diartikan dengan kegiatan-kegiatan berusaha oleh orang-orang dalam ruang lingkup kecil yaitu yang berhubungan dengan modal, tenaga kerja dan gerak usahanya.

Pengusaha kecil dapat pula merupakan kegiatan usaha industri tradisional, menengah, ataupun industri maju.

Dalam penulisan ini dikemukakan hanya pada industri tradisional, yaitu industri yang dari dulu sampai sekarang diusahakan di kabupaten Tegal.

Di dalam Undang-Undang Perindustrian (Undang-undang No. 5 Tahun 1984). tidak menyebutkan industri kecil maupun pengusaha kecil.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan Usaha kecil.

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa :

Usaha Kecil ialah usaha ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya pada pasal (1) ayat 5 Undang-undang No. 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun kriteria Usaha Kecil disebutkan dalam pasal (5) ayat 1 sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau,

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
- c. Milik WNI ,
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan/ Cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau usaha besar,
- e. Berbentuk Usaha Orang Perseorangan, Badan Usaha yang tidak berbadan Hukum, atau Badan Usaha yang Berbadan Hukum termasuk Koperasi,

Ayat tersebut bertitik tolak dari kriteria usaha kecil dimana usahanya meliputi tiga(3)kriteria, yaitu: - kekayaan,

- hasil usaha tahunan,
- bentuk badan usaha .

Mengenai kebijaksanaan Pemerintah Soehardjo, Ss menggolongkan menjadi 3 macam :

1. Yang mendasarkan pada tugas Pemerintah.
2. Yang mendasarkan atas atas/ segi Kebijaksanaan Pemerintah.
3. Yang dihubungkan dengan tujuan/ sasaran Kebijaksanaan Pemerintah.

Apabila kita lihat tulisan-tulisan Bauer (1968). Kebijaksanaan merupakan satu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan datang atau yang diharapkan.

Bauer membedakan pada 3 tingkat keputusan tetapi berlainan yang didasarkan pada luasnya implikasi-implikasi dari tingkat-tingkat keputusan tersebut.

1. Keputusan tingkat pertama adalah keputusan yang sepele dan bersifat berulang mengenai tindakan-tindakan rutin yang dibuat hampir setiap hari.
2. Keputusan tingkat kedua adalah keputusan yang lebih kompleks yang memiliki sifat jangkauan yang lebih luas dan membutuhkan tingkat nalar atau analisis tertentu, keputusannya disebut taktik.

3. Tingkat keputusan yang ketiga, dimana istilah Kebijakanaksanaan disediakan untuk itu, adalah keputusan-keputusan yang memiliki jangkauan yang lebih luas, perspektif waktu yang paling lama dan yang umumnya memerlukan informasi dan kotemplasi yang terbanyak.²

R.S. Paker (1975), berpendapat bahwa Kebijakanaksanaan identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Salah satu definisinya menyebutkan bahwa :

“Kebijakanaksanaan Negara itu adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian azaz tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subyek atau berbagai respons terhadap suatu keadaan yang krisis.”³

Pandangan lain yang memusatkan perhatiannya pada implemetasi Kebijakanaksanaan (Policy Implemetation) melihat Kebijakanaksanaan Negara sebagai Keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan beranggapan bahwa : Kebijakanaksanaan Negara mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan (Predictable) atau dapat diantisipasi sebelumnya.

Para ahli tersebut misalnya Nakamura dan Small Wood yang memandang kebijakanaksanaan Negara dalam 3 aspek, yakni Perumusan Kebijakanaksanaan, Pelaksanaan Kebijakanaksanaan dan Evaluasi Kebijakanaksanaan.

Bagi kedua orang ahli ini sesuatu yang disebut kebijakanaksanaan negara pasti mencakup ketiga aspek tersebut.

² Soehardjo, Ss, Konstitusi dan Demokrasi-Beberapa Pemikiran tentang Hukum, Dahura Prize, Semarang, 1990, 18

³ RS Parker, Sosiologi Industri, Bhinneka Cipta. 1992, 21

Dalam hubungan ini, mereka berpendapat bahwa Kebijakan Negara adalah “Serentetan Instruksi/Perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan. Yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan.

Istilah kebijaksanaan kerap kali juga dipakai untuk menunjukan pernyataan-pernyataan kehendak dari pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam suatu bidang tertentu atau mengenai keadaan umum yang diharapkan dicapai pada kurun waktu tertentu.

Sebagai contoh dapat dikemukakan pernyataan-pernyataan kehendak dari pemerintah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau untuk menciptakan disiplin nasional atau untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa.

Masalah kebijaksanaan Pemerintah seperti diuraikan diatas, adalah sesuai dengan Instruksi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil No : 01/Ins/M/4/1994 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Pelita VI, dimana tujuan dari pembinaan tersebut adalah :

- a. Tumbuh dan berkembangnya koperasi sebagai Badan Usaha yang mandiri dan Pengusaha Kecil yang tangguh dan modern dalam Perekonomian Nasional.
- b. Tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan Pengusaha Kecil untuk berperan dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat.
- c. Tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan Pengusaha Kecil untuk berperan dan memperkokoh struktur Perekonomian Nasional.

Dengan demikian kebijaksanaan pemerintah yang ada adalah mendukung perlunya pengembangan Usaha Kecil, dimana alasan - alasan yang mendukung adalah :

1. Masalah Fleksibilitas dan Adaptabilitasnya didalam memperoleh bahan mentah dan peralatan.
2. Relevansinya dengan proses Desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor – sektor ekonomi yang lain.
3. Potensinya terhadap penciptaan dan perluasan kesempatan bagi para pengangguran.
4. Peranannya dalam jangka panjang sebagai basis bagi mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena industri bersekala kecil ini umumnya diusahakan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.⁴

Mengenai implemetasi atau Pelaksanaan Kebijakan Negara menyangkut berbagai aspek khususnya pada aspek Politik Negara sebagai upaya dalam pembangunan Ekonomi.

Kesadaran akan arti dari telaah yang sistematis mengenai implementasi Kebijakan Negara tersebut baru muncul pada akhir tahun 1960, atau lebih tepatnya pada awal tahun 1970 di Amerika Serikat. Kesadaran akan arti penting dari studi implementasi itu ditandai dengan munculnya berbagai macam buku, artikel ilmiah yang provokatif yang ditulis oleh pakar Kebijakan Negara semisal M. Derthick, Heidenheimer, M. Parkinson, Bardach, Pressman, dan Wildausky dan lain-lain.

Timbulnya hasrat yang semakin kuat untuk melakukan studi yang sistematis dan serius dalam bidang implementasi Kebijakan ini di Amerika Serikat terutama dirangsang oleh keinginan untuk mencari jawaban mengapa program-program “Masyarakat Besar” (The Great Society) yang dicanangkan oleh Pemerintah Presiden Johnson dimasa itu ternyata tidak berhasil mencapai tujuan – tujuan serta sasaran – sasaran yang diharapkan.⁵

⁴ Apriatni, EP, Pengembangan Usaha Kecil dalam Perekonomian, Forum no.76, 1995

⁵ Solichin Abdul Wahab, Loc cit : 172

Apabila kita lihat kebijaksanaan dalam Petunjuk Kebijaksanaan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1994 yang disebutkan pada Kebijaksanaan Umum adalah :

Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta Pengusaha Kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Mengenai Kebijaksanaan Sektorial bidang industri disebutkan :

1. Memberikan perlindungan usaha.
2. Meningkatkan kualitas dan memberikan kemudahan perizinan.
3. Meningkatkan keterkaitan usaha.
4. Mencegah perluasan usaha yang bersifat monopoli.
5. Mengembangkan industri bahan baku dan jasa konstruksi.

Sedangkan strategi Pembinaan meliputi :

- a. Meningkatkan kemampuan akses pasar dan memperbesar pasca pasar.
- b. Meningkatkan kemampuan akses terhadap sumber permodalan serta memperkuat struktur permodalan.
- c. Meningkatkan kemampuan akses dan penguasaan teknologi.
- d. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.
- e. Mengembangkan kemitraan yang mantap.⁶

⁶ SK Gubernur no 518/164/1994, Daerah tk I Jawa Tengah, 1994

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana kondisi pengusaha kecil yang ada di Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui sejauh mana Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pengusaha Kecil.
3. Memperoleh gambaran secara empiris tentang implementasi pembinaan berdasarkan UU No.10/1995.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat/kontribusi :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan masukan dalam masalah Pembinaan Strategis berkenaan dengan kondisi Pengusaha Kecil dalam Peningkatan kesejahteraannya, serta melalui sumbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendayagunaan kebijakan-kebijakan yang ada di sektor ekonomi sebagai peringkat formal dalam pelaksanaan pembinaannya.
2. Disamping itu hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai substansi disiplin bidang ilmu hukum dalam rangka mencari dan mendapatkan pemikiran-pemikiran baru maupun temuan-temuan baru tentang bagaimana sebaiknya pembinaan yang dilakukan pada pengusaha kecil selain undang-undang dan peraturan pelaksana yang lain.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah terjemahan dari kata research (bahasa Inggris), berasal dari kata “re” yang berarti kembali dan “search” yang berarti mencari. Sehingga arti research adalah mencari kembali.

Menurut kamus Webster's New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu.

Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metodologi penelitian atau metodologi riset.

Sehubungan dengan hasil yang hendak dicapai dari penyusunan tesis ini adalah usaha menemukan hukum *in concreto* dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu, maka diperlukan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Karena itu untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* dan dimana peraturan hukum ini dapat diketemukan termasuk kedalam penelitian hukum juga yaitu disebut dengan istilah "legal research".

Yang dimaksudkan dengan penelitian hukum atau "legal research" di Amerika Serikat yaitu :

Seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation."

Kata Jacobstein dan Mersky

"The search is always first for mandatory primary sources, that is constitutional or statutory provision of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decisions from courts of other common law jurisdictions. When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities."⁷

⁷ Julia Brennan, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, 31

Penelitian ini diarahkan pada masalah pokok yaitu kebijaksanaan Pemerintah pada Pembinaan Pengusaha Kecil.

Diskripsi tentang Pembinaan Pengusaha Kecil berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada yaitu produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat sampai pada produk-produk hukum yang ada di daerah.

Selanjutnya dari ketentuan-ketentuan tersebut dilihat apakah masyarakat bisa menerima dan melaksanakan serta memanfaatkan kebijaksanaan tersebut.

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang bertitiktolak dari ketentuan dan peraturan perundangang yang berlaku, kemudahan meneliti pelaksanaandari aturab-aturan tersebut termasuk bagaimana anggapan masyarakat. Dengan demikian peneliti ini dapat mengetahui bagaimana ketentuan perundang-undangan dilaksanakan di dalam praktek, sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung atau penghambat dari permasalahan yang diteliti. Peneliti yang dilaksanakan ini menggunakan ketentuan-ketentuan normatif sebagai bahan utama seperti UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, Undang-undang dan peraturan Perundang-undangan serta teori-teori Hukum dan hasil-hasil penelitian yang terkait.

2. Spesifikasi Penelitian

Secara umum penelitian ini adalah penelitian Hukum (legal research) khususnya untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan Pemerintah yang ada sesuai dengan Undang-undang, sehingga untuk itu diisyaratkan pula inventarisasi hukum

positif yang ada, dengan demikian tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Selanjutnya secara faktual berkaitan dengan pelaksanaan hukum, penelitian hukum ini berusaha untuk merumuskan hukum secara *in concreto* terutama yang berkaitan dengan masyarakat pendukung hukum (kebijaksanaan) sehingga penelitian hukum ini berarti pula memperhatikan aspek sosio, yaitu berupa sikap, perilaku dan kemampuan masyarakat pendukung hukum itu sendiri terutama di dalam tindak lanjut adanya kebijaksanaan pada Pembinaan Pengusaha Kecil.

3. Daerah Penelitian

Daerah penelitian adalah Kabupaten Dati II Tegal, dengan dasar pertimbangan, bahwa kabupaten Tegal merupakan prioritas daerah industri di Jawa Tengah, berdasarkan data BPS tahun 1993 dari 1.041.0200 industri kecil yang ada di Jawa Tengah maka di Kabupaten Tegal tercatat 12.042 unik industri kecil.

4. Jenis dan Sumber Data

4.a. Jenis Data

Dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder namun titik berat pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersikap penunjang.

4.b Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari :

Sumber sekunder penulis perolehan dari badan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Sumber sekunder dari bahan hukum primer berpusat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Pembinaan Pengusaha Kecil, yaitu UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah sebagai penunjang Undang-Undang tersebut termasuk didalamnya adalah ketentuan-ketentuan daerah.

Sedangkan sumber sekunder dari bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah yang telah dikeluarkan, pendapat-pendapat para ahli hukum serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang menyangkut Pengusaha Kecil.

Disamping itu digunakan pula data sekunder berupa data pengusaha kecil (baik dalam jumlah, program ataupun pelaksanaan kegiatan) mulai tahun 1992 sampai dengan 1995. Dipakainya kriteria 3 tahun ini mengingat Pembinaan Pengusaha Kecil baru dilaksanakan sejak tahun 1992

Sumber primer ialah data yang penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah tentang Pembinaan Pengusaha Kecil.

Digunakannya data empiris ini sebagai pelengkap dari data sekunder yaitu data primer dari hasil wawancara dengan pejabat Departemen Perindustrian dan pimpinan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kabupaten Tegal.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diteliti.

Yang menjadi populasi (sebagai data primer) dalam penelitian ini adalah para pengusaha kecil. Para petugas Pembinaan dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dari Departemen Perindustrian dan dari Departemen Perdagangan.

Sedangkan sampel adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi.

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka dalam menentukan sampel dari populasi yang diteliti menggunakan metode Propotional Purpusive Sampling yaitu memilih sampel yang ditetapkan berdasarkan keterlibatannya dalam proses melakukan pembinaan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah. Hal tersebut diambil dengan anggapan dan keyakinan bahwa sampel tersebut akan dapat memberikan informasi yang benar bagi tujuan penelitian.

Atas dasar keterbatasan kemampuan peneliti juga waktu dan dana, maka responden yang diambil dalam penelitian ini adalah :

a. Pengusaha kecil, dengan kriteria :

- menengah
- tangguh

b. Para petugas pembinaan Pengusaha Kecil dari :

- Depkop dan PKK sebanyak 12 orang terdiri dari :
 - Depkop dan PKK Kab Tegal sebanyak 5 orang.
 - Depkop dan PKK Kodya Tegal sebayak 2 orang.
 - Depkop dan PKK Kab Klaten sebayak 3 orang.
 - Depkop dan PKK Kab Jepara sebayak 2 orang.

- Dep Perindustrian Kab Tegal sebanyak 3 orang.
- Dep Perdagangan Kab. Tegal sebanyak 2 orang.

6. Metode Pengumpulan Data

6.a. Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen.

Studi kepustakaan dan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

6.b. Studi Lapangan

Studi lapangan dipergunakan untuk memperoleh data primer berupa pendapat masyarakat (pengusaha kecil) mengenai kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka membina para Pengusaha Kecil di Kabupaten Tegal, seberapa jauh Pemerintah (Departemen Koperasi dan PKK serta instansi lain yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pembinaan) telah melaksanakan tugasnya. Disamping itu untuk melihat apakah pembinaan yang telah dilakukan bisa diterima oleh masyarakat serta seberapa jauh manfaat bagi Pegusaha kecil.

7. Teknik Penyajian dan Analisa Data

7.a. Teknik Penyajian Data

Teknik yang ditempuh dalam menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dan kuantitatif.

Teknik kualitatif digunakan untuk menyajikan data berupa informasi, pendapat, konsep, doktrin hukum, serta pandangan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Sedangkan teknik kuantitatif digunakan untuk menyajikan data bersifat kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi dan prosentase.

7.b. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara normatif, deskriptif, historis dan komparatif.

Normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

Deskriptif karena penelitian dilakukan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai kebijakan legislatif dalam merumuskan model-model kemitraan yang diterapkan pada Pengusaha Kecil.

Historis yaitu berkaitan dengan sejarah mengapa dikeluarkan Undang-undang No. 9 tahun 1995.

Sedangkan analisis komparatif menguraikan pengaturan kebijaksanaan – kebijaksanaan dalam Pembinaan Pengusaha Kecil yang ada di beberapa daerah yang bersifat melengkapi dan memperdalam analisis normatif dan deskriptif sebagaimana diuraikan di atas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan thesis ini terdiri dari 4 (macam) bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Pendahuluan berisikan antara lain :

1. **Latar Belakang** : yaitu alasan di ambalnya penelitian pada Pembinaan Pengusaha Kecil.
2. **Permasalahan** : yaitu seberapa jauh pembinaan diterapkan pada pengusaha kecil sehubungan dengan dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang Pembinaan Usaha Kecil.
3. **Tujuan Penelitian** : yaitu hal-hal yang menyangkut tujuan baik jangka pendek maupun jangka akhir dari pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah.
4. **Kegunaan Penelitian** : berisikan sejauh mana penelitian ini berguna bagi pengusaha kecil dan pembuat kebijaksanaan.
5. **Kerangka Teoritik** : yaitu landasan peraturan yang dipakai dalam menentukan awal adanya kebijaksanaan pemerintah pada Pembinaan Usaha Kecil.
6. **Metodologi Penelitian** : menggambarkan secara keseluruhan metode yang dipakai dalam pendekatan thesis ini.

Bab II Berisi Tinjauan Pustaka yang akan membahas tentang kebijaksanaan Pemerintah dalam pembinaan Pengusaha Kecil, analisa dikelompokannya kebijaksanaan pemerintah ini pada Hukum Administrasi Negara serta teori-teori yang menunjang masalah pembinaan pengusaha kecil. Disamping itu juga hal-hal yang dipakai dalam kebijaksanaan pemerintah ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di bidang Ekonomi.

Bab III Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan difokuskan pada Kebijakan Legislatif dalam penetapan dan perumusan kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah pembinaan. Model kebijaksanaan yang ada dan dipakai serta diterima oleh masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab IV Merupakan bab terakhir yaitu memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta yang relevan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMAHAMAN TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

Pokok-pokok kebijaksanaan dalam Pembinaan Pengusaha Kecil telah tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Didalam Pancasila arahan fundamental untuk mencapai kesempatan berusaha dan kesejahteraan adalah sistem sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Di dalam UUD 1945 disebutkan :

Pasal 27 ayat (2) : “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 33 ayat (1) : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Berdasarkan arahan tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam memperoleh dan meningkatkan kesejahteraannya dengan jaminan yang kuat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena hak yang sama itu pula maka bangsa Indonesia mempunyai kesempatan dalam segala usahanya sebatas tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Pembangunan di bidang ekonomi mempunyai tujuan penegakan sistem Demokrasi Ekonomi dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan dunia usaha sehingga hasil yang diperoleh dapat ditentukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam hal yang demikian perlu pula diperhatikan doktrin Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang antara lain menyatakan : “Keamanan ekonomi untuk tumbuh dan berkembang semakin mantap, serta didukung pula oleh sistem yang semakin efisien,

industri yang semakin maju dan kualitas tenaga kerja yang semakin meningkat. Industri strategis juga berkembang semakin baik, namun perlu diwaspadai kemungkinan meluasnya monopoli dan melebarnya kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan ekonomi sebagai penyebab dari proses pembangunan yang kurang merata yaitu memusatnya pembangunan di kota besar, menyebabkan desa kurang mendapat perhatian secara proposional. Hal yang lebih jauh dari kesenjangan ekonomi yaitu kemiskinan masyarakat yang membawa dampak berkurangnya laju pembangunan khususnya pembangunan di pedesaan.

Tulus Tambunan : peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia menyatakan bahwa :

“Kalau Industrialisasi di pedesaan dipakai sebagai pengurangan kesenjangan ekonomi maka pola atau strategi pembangunan yang bagaimana yang tepat diterapkan di pedesaan, apakah industri-industri besar harus dibangun ataukah hanya industri-industri kecil saja, apakah pertanian di pedesaan harus tetap sebagai sektor unggulan, apakah sektor manufaktur, jenis-jenis industri yang sangat cocok dikembangkan di pedesaan”.⁸

Sebagai penunjang industrialisasi tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi di pedesaan antara lain dengan mendorong dengan terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sentra Industri Kecil. KUB ini bertugas membangun masyarakat usaha skala kecil yang mandiri, tidak hanya mampu dalam teknik maupun management, tetapi juga tangguh dalam menciptakan, menguasai dan memelihara pasarnya. Dengan cara bergabung membentuk kelompok dalam usaha bersama dapat dikembangkan menjadi tempat Sharing. KUB yang dimaksud sebagai percontohan usaha

⁸ Boediono, Pokok pikiran mengenai Pembinaan Sektor Informal dalam menunjang laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Makalah pada Seminar Menyerap Informasi pada Pembangunan Daerah, Tegal, 1990, 3.

industri termasuk pada pemberian paket bantuan terutama ketrampilan, bimbingan dan teknologi, desain dan pemasaran serta informasi yang diharapkan dapat mendorong kemasyarakatan yang lain.

Mengenai pemikiran pemahaman tentang kebijaksanaan pemerintah kita kutip pendapat dari Hog Woob dan Guun sebagai berikut :

Kebijaksanaan dikelompokkan kedalam 10 kelompok :

1. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (policy as label for a field of activity).
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (policy as an expression of general purpose or desired state of affairs).
3. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (policy as spesific proporsals).
4. Kebijakan sebagai keputusan Pemerintah (policy as decision of Government).
5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (policy as formal authorization).
6. Kebijakan sebagai progran (policy as programme)
7. Kebijakan sebagai keluaran (policy as output).
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (policy as outcome).
9. Kebijakan sebagai sebuah teori atau model (policy as a theory or models).
10. Kebijakan sebagai proses (policy as process)⁹

⁹ Soehardjo SS, Politik Hukum, Universitas Diponegoro, 1994; 9

B. SASARAN KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN DALAM

PEMNAGUNAN EKONOMI

Dalam pemahaman kebijaksanaan Pengusaha Kecil, kita fokuskan pada 3 hal aialah :

1. Kebijaksanaan sebagai suatu program

Program disini yang dimaksud adalah lingkup kegiatan Pemerintahan yang relatif khusus dan jalan batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legislasi pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber yang diperlukan.

Program yang dilakukan dalamkebijaksanaan Industri Kecil, meliputi :

- a. Program pemberian Kredit bagi Industri Kecil.
- b. Program pemberian izin usaha.
- c. Program Pembinaan Pengusaha Kecil atau managerial.
- d. Program Pembinaan Kewirausahaan.

2. Kebijakan sebagai keluaran.

Kebikajan disini dilihat sebagai apa yang senyatanya diberikan oleh Pemerintah sebagai lawan dari apa yang telah dijanjikan atau telah disahkan lewat undang-undang.

Dalam pelaksanaan Pembinaan Pengusaha Kecil tidak secara nyata terlihat dan bukan tepat diberlakukan, tetapi beberapa ketentuan memakai ketentuan kebijakan sebagai keluaran ini, yaitu dalam hal Pemerintah memberi bantuandana pada Pengusaha Kecil Mandiri dengan ketentuan :

- Mempunyai aset maksimal 200 juta
- Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 milyar

- Milik WNI, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan
- Berbentuk usaha orang perorangan (pasal 5 UU No. 9/1995).

Namun karena belum siapnya Pengusaha Kecil. Khususnya pada administrasi manajemen, sehingga Perusahaan Kecil tersebut masih tergabung pada kelompok perusahaan (anak perusahaan).

3. Kebijakan sebagai hasil akhir.

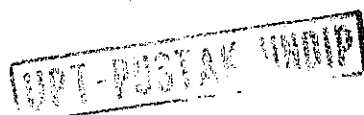
Kebijakan disini merupakan kebijakan dalam artian yang senyatanya dicapai. Hampir sama dengan kebijakan sebagai hasil keluaran, bedanya :

Pada kebijakan hasil akhir, di berikan penilaian mengenai apakah tujuan formal dari suatu kebijakan benar-benar akan tercapai atau benar-benar akan terwujud dalam praktek kebijakan yang sebenarnya. Hal ini juga banyak kita bahas, karena kebijakan yang kita berikan pada Pengusaha Kecil pelaksanaannya tidak seperti yang diberikan. Seperti halnya Solichin Abdul Wahab melihat bahwa :

Pelaksanaan kebijaksanaan dan dampaknya jarang sekali sebagai akibat hubungan langsung antara instrumen kebijaksanaan tertentu atau interaksi organisasi tertentu dengan lingkungan untuk menghasilkan dampak yang jelas.

Hal ini bisa kita contohkan pada ketentuan izin industri, dimana Industri kecil dianjurkan mendaftarkan sebagai upaya untuk menghimpun dan mengetahui beberapa jumlah industri yang ada di Kabupaten Tegal sebagai pedoman untuk pembinaan selanjutnya.

Dengan demikian tujuan pembinaan bagi pengusaha kecil tidak bisa merata sampai kebawah (pengusaha kecil yang benar-benar memerlukan pembinaan), karena yang diketahui Pemerintah hanyalah pengusaha yang mau mendaftarkan diri.



C. PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DALAM KELOMPOK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Sebelum membicarakan tentang Hukum Administrasi Negara, maka perlu kita lihat apa sebenarnya arti administrasi. Istilah administrasi dilihat dari 2 arti, yaitu:

1. Dalam arti sempit, istilah administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni administrasi adalah kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan reproduksi dari pada surat-surat. Data informasi dokumen-dokumen dalam suatu kantor/unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan cara kerja tertentu.
2. Dalam arti luas, bahwa istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni administration, yang dalam arti harfiah adalah :
 - a. memimpin, menguasai, mengendalikan dan melaksanakan hukum
 - b. melayani/ mengatur kepentingan dengan berpedoman kepada peraturan hukum, sebagai kekuasaan pemerintah guna mengatur kepentingan umum dan negara.

Kemudian Hukum Administrasi Negara menurut Prof. J. Oppenheim adalah

Keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan segara itu menjalankan kekuasaannya. Jadi pada azasnya mengatur negara dalam keadaan (de staat in beweging).¹⁰

Selanjutnya sifat-sifat Hukum Administrasi Negara menurut Siti Soetami antara lain :

1. HAN peka terhadap politik, dimana politik disini adalah kebijaksanaan kenegaraan, sedangkan Pemerintah sebagai penguasa negara. Pemerintahan sebagai penguasaan kenegaraan berarti bertugas menyelenggarakan segala tugas yang telah ditetapkan oleh kebijaksanaan kenegaraan. Pemerintah harus menerima

¹⁰ J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, 71

tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijaksanaan kenegaraan sebagai kenyataan-kenyataan belaka.

2. HAN menelusup/merembes segala aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan dibidang sosial, ekonomi, dari masyarakat pasti akan membawa kita pada suatu keadaan, dimana Pemerintah akan menyusup ke segala aspek kehidupan masyarakat, yang dimasa lampau terlarang baginya. Suatu Pemerintahan modern akan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat dan turut serta secara aktif dalam lalu lintas kemasyarakatan, sehingga kesejahteraan sosial semua orang terpelihara.¹¹

Dari sifat HAN sebagai aspek kehidupan dibidang ekonomi yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta HAN dapat menelusup dalam semua permasalahan perekonomian, maka Pengaturan Pembinaan Pengusaha Kecil dikelompokkan dalam Hukum Administrasi Negara.

Dimasukkannya Pembinaan Pengusaha Kecil dalam kelompok Hukum Administrasi Negara karena didasarkan pembagian Hukum Administrasi Negara itu sendiri kedalam dua bagian yang menurut Soehardjo, SS dalam bukunya Hukum Administrasi Negara :

1. Bagian Umum, meliputi permasalahan yang bersifat umum, yaitu permasalahan yang berlaku untuk semua ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang - undangan bidang Hukum Administrasi Negara, misalkan bermacam bentuk tindakan Pemerintah/perbuatan Hukum Administrasi,

¹¹ Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1993,8

perlindungan hukum, persyaratan umum yang mengikat Pemerintah dalam melaksanakan tindakan-tindakannya, sanksi administrasi dan sebagainya.

2. Bagian khusus, disini Hukum Administrasi Negara dibagi menjadi tiga bagian ialah :

- a. Pembagian pertama dengan mendasarkan pada tugas pemerintah, yaitu tugas pemeliharaan ketertiban dan tugas pada pemeliharaan kesejahteraan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, maka titik berat ketentuan hukumnya diletakkan pada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditaati oleh warga masyarakat. Misalkan dalam pemeliharaan kesejahteraan, pemerintah menyediakan kemudahan-kemudahan fasilitas, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyediaan dana, tenaga dan kelembagaan.
- b. Didasarkan atas segi kebijaksanaan Pemerintah, misalkan dilihat dari segi hubungan Internasional, peningkatan kesejahteraan dalam pembagiannya, pengaturan tata ruang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemasyarakatan dan kebudayaan.
- c. Dihubungkan dengan sasaran atau tujuan kebijaksanaan Pemerintah, disini dapat diperinci :
 - tingkat kehidupan kejiwaan dan budaya
 - masalah-masalah sosial ekonomi
 - pemeliharaan kesehatan
 - keadaan kehidupan fisik
 - keamanan

- berfungsinya pemerintahan umum dalam lingkup intern

Sehubungan dengan banyaknya peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara di Indonesia, maka telah disajikan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan dengan pola pengelompokan dalam GBHN. Dalam masalah industri pengelompokan peraturan-peraturan yang ada meliputi antara lain pada ketentuan-ketentuan :

- Undang-Undang No. 5/1984 tentang Perindustrian
- Kewenangan pengaturan pembinaan dan pengembangan industri
- Izin Usaha Industri
- Penyederhanaan pemberian izin usaha industri

Sesuai dengan perkembangan bangsa, berkembang pula HAN di Indonesia yang perumbuhannya sudah dinilai sejak selesainya kodifikasi Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Pidana.

Sebagai ilmu Sosial terapan, Hukum Administrasi Negara mempelajari hubungan antara pengetahuan dengan tindakan, seperti halnya sarjana-sarjana sosial dan para pemikir sosial disamping harus dituntut menghasilkan ilmu pengetahuan juga berperan menghubungkan pengetahuan yaitu dengan berbagai macam metode analisa seperti DUNN dan LASSWELL mengatakan secara khusus bahwa :

Analisa kebijaksanaan publik dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai dan didalam proses kebijaksanaan. Ilmu ini berusaha merangkum ilmu-ilmu khusus seperti ilmu Ekonomi, Sosiologi, Politik, Psikologi, Administrasi Negara, Matematik, Filsafat dan Etika.

Selanjutnya dijelaskan oleh DUNN, jika tujuan akhir analisa kebijaksanaan adalah dihasilkan saran-saran kebijaksanaan yang dapat diterapkan, maka aspek nilai harus masuk kedalam analisa. Masuknya nilai kedalam analisa kebijaksanaan bersifat subyektif, atau mengekor pada garis politik praktis tertentu. Tugas analisis bukan mengkampanyekan nilai, tetapi menyodorkan masukan nilai dibawah kondisi apa suatu usaha dapat mencapai nilai tertentu.

Pertumbuhan Hukum Administrasi Negara yang semakin cepat itu membuka kenyataan bahwa saat ini peraturan yang berlaku sebagian besar adalah Hukum Administrasi Negara, sedangkan yang menyebabkan cepatnya pertumbuhan Hukum Administrasi Negara adalah tuntutan tindakan-tindakan Pemerintah yang menjalankan fungsinya untuk memajukan kesejahteraan rakyat sesuai dengan usaha melancarkan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam GBHN.

Beberapa faktor yang mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Pertumbuhan penduduk yang terlalu padat disuatu daerah sehingga menyebabkan bentrokan kepentingan yang satu dengan yang lain, dan perlu diadakan kesamaan langkah tentang pengaturan tanah, tata ruang, perumahan, kawasan industri dan sebagainya.
2. Perkembangan teknologi yang diterapkan dibidang industri, pertanian, perhubungan dan sebagainya.
3. Faktor krisis dan bencana alam, dimana situasi krisis dan bencana alam banyak terdapat dalam bidang ekonomi, sehingga Pemerintah perlu campur tangan melalui pengaturan impor dan ekspor.

4. Faktor yang timbul dari pertumbuhan masyarakat itu sendiri dari perubahan sikap masyarakat terhadap fungsi negara seperti bantuan terhadap fakir miskin, pemeliharaan kesejahteraan rakyat, perbaikan perumahan kumuh dan sebagainya.

D. SASARAN KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan di bidang ekonomi faktor penggerak utama dalam melaksanakan program pembangunan secara menyeluruh. Pelaksanaan secara menyeluruh tersebut selaras dengan peningkatankualitas sumber daya manusia dengan didorong oleh bidang-bidang pembangunan lainnya serta senantiasa memperhatikan keseimbangan antara sektor pertanian dan industri. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil yang dicapai merupakan produk bermutu tinggi, memiliki daya saing kuat serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sasaran kebijaksanaan merupakan pelaksanaan Repelita VI dimana sudah diarahkan pada kebijaksanaan khusus, yang berusaha untuk menyediakan sejumlah dana sebagai modal usaha bagi pengembangan Pengusaha Kecil, dimana dasarnya adalah kebijaksanaan dalam strategi PJPTII dengan berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan dan usaha pencapaian Delapan Jalur Pemerataan.

Pada Pelita VI sebagai arahan dari GBHN 1993, pengembangan industri kecil mempunyai misi sebagai perwujudan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia secara selaras sehingga Pembangunan Jangka Panjang yaitu masyarakat Adil dan Makmur akan tercapai.

Juga ditekankan dalam Tap MPR II/MPR/1993, pada bagian
Ekonomi poin 8 disebutkan bahwa :

Pengembangan dan pembinaan ekonomi nasional meliputi Koperasi, Usaha Negara dan Usaha Swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama Pembangunan Ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri.

Dengan demikian terlihat didalam GBHN 1993 menghendaki peran keseimbangan ketiga pelaku ekonomi tersebut, yaitu :

- Koperasi,
- Usaha negara
- Usaha swasta

Ibrahim M. melihat bahwa :

Ketiga pelaku ekonomi tersebut ternyata kurang mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yaitu dalam fungsinya, sehingga peranannya kurang jelas dan tanpa perbedaan secara spesifik, seperti kekhasan sistem ekonomi Pancasila oleh para ekonomi Indonesia.¹²

Untuk mengacu pada pasal 33 UUD 1945 seyogyanya kita amati pada penjelasan pada pasal 33 UUD 1945 bahwa dalam pasal tersebut tercantum dasar Demokrasi Ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang dipentingkan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sudah sesuai dengan itu adalah Koperasi.

¹² Ibrahim, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bhakti, 1997; 133

Perekonomian berdasar atas Demokrasi Ekonomi, menghendaki kemakmuran bagi segala orang. Oleh sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Apabila Negara tidak bertindak demikian maka kekuasaan produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa sehingga rakyat banyak ditindas. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh dilaksanakan oleh orang seorang. Demikian juga bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam Pembangunan jangka panjang apabila kita telusuri dari beberapa teori ekonomi yang ada yang memanfaatkan sistem ekonomi dengan permasalahan-permasalahan ekonomi jangka panjang, seperti pada teori Harrod Domar yang pada hakekatnya menganalisa mengenai persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam perekonomian agar terjamin kesempatan penanaman modal yang sepenuhnya dipergunakan, sehingga tercapai pertumbuhan yang mantap atau steady grow dalam perekonomian. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Keynes yang berpangkal pada teori sistem ekonomi liberal Adam Smith yang kemudian banyak diikuti oleh beberapa negara karena pertumbuhan ekonomi serta teknologi yang melahirkan teori ekonomi makro. Masalah-masalah perekonomian dalam pertumbuhan ekonomi banyak diwarnai dengan depresi sebagai akibat akumulasi modal dan perubahan-perubahan teknologi sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro dapat memecahkan masalah perekonomian tertentu.

Apa yang dipermasalahkan dalam ekonomi makro adalah menyangkut masalah kegunaan ekonomi yang secara ilmu ekonomi berguna karena ia memberikan petunjuk

mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu .

Secara garis besar Permasalahan Kebijakan makro mencakup dua masalah pokok :

a. Masalah Jangka pendek atau stabilisasi, masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir” Perekonomian Nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, atau dari tahun ke tahun agar terhindar dari tiga “Penyakit Makro” utama yaitu :

1. Inflasi
2. Pengangguran, dan
3. Ketimpangan dalam neraca Pembayaran

b. Masalah Jangka panjang atau Pertumbuhan

Masalah ini mengenai bagaimana kita “menyetir” Perekonomian kita agar ada kesadaran antara pertumbuhan penduduk pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi.

Pada dasarnya masalah tersebut juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro.

Masalah teori makro kita kedepankan karena saat ini tendensi globalisasi dari aspek kehidupan setelah mengakibatkan tatanan dunia berubah dengan cepat dan mendasar baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun Hankam, sehingga dengan tanpa didasari secara drastis telah mengubah Pola Investasi Produksi Ekonomi makro dalam kebijaksanaannya telah banyak memberi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat kita lihat bahwa selama PJPT I Pertumbuhan Ekonomi Nasional mencapai rata-rata 10% pertahun. Dan peranannya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 20 % pada akhir tahun 1992.

Sumbangan terhadap Ekspor Nasional tahun 1993 mencapai 63% atau 86% dari ekspor non migas, dengan peningkatan rata-rata diatas 25% pertahun.¹³

Teori dan kebijaksanaan yang semula di pandang tepat dan dapat mengatasi "Aggregate Demand" dalam tingkat "Empoyment" ternyata dalam jangka panjang mempunyai akibat berupa pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan makin lama makin dirasakan tidak cocok lagi untuk mengatasi masalah-masalah baru yang terjadi sebagai akibat perubahan-perubahan struktural itu.

Pada tahun 1962 Grove melihat tentang Peranan Pemerintah di bidang industri meliputi pengontrol, pengatur, promotor, pengusaha dan perencana.

Dalam peranan sebagai Pengatur, Pemerintah membuat suatu rangka aturan untuk mengatur operasi semua perusahaan. Aturan tersebut bertujuan melindungi para konsumen dan para investor, mengatur dan mengontrol perjanjian dan perdagangan dan mengatur kondisi kerja dan tingkat upah minimal¹⁴

Sejalan dengan pemikiran Grove Pemerintah dalam menangani masalah Pengusaha Kecil hendaknya memperhatikan fungsinya masalah Pengusaha Kecil hendaknya memperhatikan fungsinya sebagai Pengontrol dan pengatur. Dalam peranannya sebagai Pengatur, melalui Kebijaksanaannya Pemerintah dapat mengatur para pengusaha yang sifatnya memberi perlindungan dengan Produk hukum yang dikeluarkan.

Dalam peranannya sebagai pengontrol maka hubungan hukum itu kita lihat dari Fungsi Hukum itu didalam masyarakat.

¹³ BAPIK/DOC/002/1994; 1

¹⁴ Parker, Sosiologi Industri, Bhinneka, Jakarta, 1992,

Satjipto Rahardjo membagi Fungsi Hukum menjadi :

1. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan "social engineering".¹⁵

Kalau fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendalian sosial, maka kita akan melihat hukum sebagai menjalankan tugas untuk mempertahankan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana telah ditentukan, atau sebagaimana diharapkan daripadanya.

Fungsi Hukum di sini mengharap agar masyarakat menjalankan peranannya sesuai dengan sistem sosial yang berlaku. Masyarakat akan berjalan baik, sehingga hukum hanya menjaga ketertiban permainan tersebut.

Lain halnya dengan fungsi hukum sebagai "social engineering" dimana hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada di dalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.

Dalam pemahaman kebijaksanaan Pengusaha Kecil, kita fokuskan pada 3 hal ialah :

1. Kebijakan sebagai suatu program

Program disini yang dimaksud adalah lingkup kegiatan Pemerintahan yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/ legislasi, pengorganisasian dan pengerahan sumber-sumber yang diperlukan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi pengembangan Ilmu Hukum, Alumni Bandung; 22

Program yang dilakukan dalam Kebijaksanaan Industri Kecil, meliputi

- a. Program pemberian kredit bagi Industri Kecil
- b. Program pemberian izin usaha
- c. Program pembinaan Pengusaha Kecil / managerial
- d. Program pembinaan Kewirausahaan

2. Kebijakan sebagai Keluaran

Kebijakan disini dilihat sebagai apa yang senyatanya diberikan oleh Pemerintah sebagai lawan dari apa yang telah dijanjikan /telah disahkan lewat Undang-undang.

Dalam pelaksanaan Pembinaan Pengusaha Kecil tidak secara nyata terlihat dan bukan tepat diberlakukan, tetapi beberapa ketentuan memakai ketentuan kebijakan sebagai keluaran ini, yaitu dalam hal Pemerintahan memberi bantuan dana pada Pengusaha Kecil mandiri dengan ketentuan :

- Mempunyai aset maksimal 200 juta
- Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 milyar
- Milik WNI, berdiri sendiri bukan anak perusahaan
- Berbentuk usaha orang perseorang (Pasal 5 UU No. 9/1995)

Namun karena belum siapnya Pengusaha Kecil khususnya pada administrasi manajemen, sehingga Perusahaan Kecil tersebut masih tergabung pada kelompok perusahaan (anak perusahaan).

3. Kebijakan Sebagai Hasil Akhir

Kebijakan disini merupakan kebijakan dalam artian yang senyatanya dicapai. Hampir sama dengan kebijakan sebagai hasil keluaran, bedanya.

Pada kebijakan hasil akhir, di berikan penilaian mengenai apakah tujuan formal dari suatu kebijakan benar-benar akan tercapai atau benar-benar akan terwujud dalam praktek kebijakan yang sebenarnya. Hal ini juga banyak kita bahas, karena kebijakan yang kita berikan pada Pengusaha Kecil pelaksanaannya tidak seperti yang diberikan. Seperti halnya Solichin Abdul Wahab melihat bahwa :

Pelaksanaan kebijaksanaan dan dampaknya jarang sekali sebagai akibat hubungan langsung antara instrumen kebijaksanaan tertentu atau interaksi organisasi tertentu dengan lingkungan untuk menghasilkan dampak yang jelas.

Hal ini bisa kita contohkan pada ketentuan izin industri, dimana Industri kecil dianjurkan mendaftarkan sebagai upaya untuk menghimpun dan mengetahui berapa jumlah industri yang ada di Kabupaten Tegal sebagai pedoman untuk pembinaan selanjutnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Secara berturut-turut hasil penelitian dan analisisnya akan dinyatakan sebagai berikut :

- A. Diskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Tegal.
- B. Pola pengembangan dan Peraturan Yang Mengatur Pembinaan Bagi Pengusaha Kecil.
- C. Implementasi Kebijakan Pemerintah.

III.A. Diskripsi karakteristik wilayah kabupaten Tegal

III.A.1. Wilayah

Kabupaten Tegal yang terletak di pesisir P. Jawa telah mempunyai nilai tersendiri di kawasan Propinsi Jawa Tengah sebagai kota Industri. Letak Kabupaten Tegal dibatasi dengan :

Sebelah Barat : Kabupaten Brebes.

Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang.

Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas.

Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa.

Berdasarkan dengan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya wilayah Kab.

Dati II Tegal dapat digolongkan :

Dataran rendah meliputi : Kecamatan Slawi, Adiwerna, Dukuh turi, sebagian Kecamatan Warureja, sebagian Kecamatan Pangkah dan sebagian Kecamatan Kedungbanteng.

Dataran rendah/pantai, meliputi sebagian Kecamatan Kramat, sebagian Kecamatan Suradadi, dan sebagian kecamatan Warureja.

Dataran tinggi/Pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Bumijawa, Bojong, Balapulung, sebagian Kecamatan Pangkah dan sebagian Kecamatan Kedungbanteng.

Melihat bentuk tata alam tersebut maka Kabupaten Tegal memiliki relief yang beraneka ragam yaitu dataran rendah, dataran rendah pantai, dan dataran tinggi/pegunungan. Sedangkan secara astronomis Kabupaten Tegal terletak pada $108,57^{\circ} 6'$ sampai dengan $109,21^{\circ} 30'$ bujur timur dan $5,5^{\circ} 41'$ sampai dengan $5,9^{\circ} 21' 03''$ lintang selatan. Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan curah hujan 1.067 mm per tahun, sedangkan temperatur udara berkisar $23,8^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $31,2^{\circ}\text{C}$ dengan kelembapan udara berkisar 81%.

Adapun luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878.554 hektar atau 37% dari luas Propinsi Jawa Tengah, terdiri dari beberapa Kecamatan:

- Margasari	8683
- Bumijawa	8856
- Bojong	5852
- Balapulung	7491
- Pagerbarang	4300
- Lebaksiu	4095
- Jatinegara	7962
- Kedungbanteng	8762
- Pangkah	3591

- Slawi	1349
- Dukuhwaru	2630
- Adiwerna	2386
- Dukuhturi	1748
- Talang	1839
- Tarub	2682
- Kramat	3849
- Suradadi	5573
- Warureja	6231

III.A.2. Penduduk.

Luas daerah tersebut diimbangi dengan penambahan Penduduk yang cukup tinggi (2,45% per tahun) dimana bisa kita lihat dari hasil sensus tahun 1990 berjumlah 1.239.351 jiwa sedangkan jumlah pada sensus tahun 1995 sebesar 1.280.913 jiwa serta data pada akhir tahun 1996 terdapat 1.312.686 jiwa dengan struktur umur :

U m u r	Jumlah
0 – 9	354.326
10 – 14	176.530
15 – 64	746.375
> 65	35.455

Sumber : Kabupaten Tegal dalam angka

Dengan demikian penduduk Kabupaten Tegal tergolong berstruktur muda karena usia yang dibawah 15 tahun lebih dari 40%.

III.A.3. Pendidikan

Sedangkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Tegal bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Jenis Pendidikan	Jumlah
Perguruan Tinggi / Akademi	4.169
SLTA	51.637
SLTP	85.731
SD	332.448
Tidak tamat SD	237.345

Sumber : Kabupaten Tegal dalam angka.

Dengan demikian disimpulkan bahwa pendidikan penduduk Tegal tergolong menengah kebawah, karena hanya 8,21 % yang lulus SLTP dan SLTA.

III.A.4. Pekerjaan

Mengenai jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat dari tabel dibawah ini,

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	146.236
Pengusaha industri / bangunan / kerajinan	135.152
Jasa / komunikasi	28.509
Pegawai Negeri Sipil	17.472
Pensiunan	6.188
Nelayan	4.185
Lain-lain (pedagang keliling, jamu gendong dan lain-lain).	22.178

Sumber : Kabupaten Tegal dalam angka.

Dengan bagan tersebut dapat dilihat bahwa pekerja yang termasuk industri kecil adalah pada poin pengusaha/industri/bangunan/kerajinan, serta pada point lain-lain karena pedagang keliling juga menjual hasil industrinya sendiri yaitu industri peralatan rumah tangga sederhana seperti pisau, alat- alat penggorengan, cetok dan lain sebagainya.

III.A.5. Perusahaan menurut sektor usaha

Sektor Usaha	Jumlah	Tenaga kerja
Industri besar/sedang	58	7.125
Industri kecil	722	5.757
Industri rumah tangga	11.422	25.912
Losmen/hotel	23	72
Restoran/warung makan	731	1.644

Sumber : Kabupaten Tegal dalam angka

III.A.6 Industri yang Terkait pada Lingkungan Industri Kecil (LIK)

Seperti yang telah diutarakan dalam halaman terdahulu kita tahu bahwa dalam konsiderans Undang-undang no. 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil disebutkan :

- a. Bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional;

- c. Bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan hukum Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-Undang tentang Usaha Kecil.¹⁶

Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pengusaha Kecil dititik beratkan pada Pembinaan terhadap Pengusaha kecil dalam usaha industri perlogaman dengan memilih lokasi pada Lingkungan Industri Kecil (selanjutnya disingkat LIK) yang pusat kegiatannya berlokasi di Kecamatan Kramat dengan letak anak industrinya terpencar di mana-mana baik di Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Pangkah dan lain sebagainya.

Pemilihan lokasi tersebut dengan dasar bahwa LIK merupakan pusat terkumpulnya para pengusaha-pengusaha baik pengusaha kecil, ataupun pengusaha menengah yang masih dalam kriteria industri kecil.

Di dalam LIK tersebut diadakan berbagai cara untuk peningkatan mutu industri dengan menekankan pada pembinaan para Pengusaha kecil baik bagi segi fisik maupun non fisik yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

¹⁶ Konsideran UU No. 9 Tahun 1995

Adapun industri di Tegal yang terkait dengan LIK daftarnya adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jenis usaha	Tenaga Kerja	Lokasi
1	Muklas Putra	Pelapisan logam	10	Talang
2	Butterfly	Plat (grendel)	16	Talang
3	Sepakat	Cor besi	8	Lebaksiu
4	Jaya Tehnik	Plat / komponen listrik	9	Talang
5	Berkah Maju	Pemesinan / mur-baut	8	Adiwarna
6	Sumber Rejeki	Cor Ferro	8	Talang
9	Zenith Mandiri Jaya	Pemesinan	8	Adiwarna
10	Sumber Makmur	Kursi Putar	8	Dukuhturi
11	Metal Sarana Jaya	Senter baut	13	Dampyak
12	Putra Bungsu Utama	Alat perkapalan	13	Dampyak
13	Makmur Lestari Jaya	Plat sepeda	12	Dampyak
14	Artof Putra	Cor Ferro	10	Dampyak

15	Lima Jaya	Rekayasa Konstruksi	12	Dampyak
16	Putra Has	Plat mesin pertanian	10	Dampyak
17	K.H	Mesin cetak genteng	10	Dampyak
18	Setia Kawan	Komponen rel kereta api	12	Talang
19	Barokah	Pemesinan	20	Panggung
20	Usaha Tehnik	Komponen tekstil	12	Kodya Tegal
21	SU Anwari	Mesin bubut	12	Kodya Tegal
22	Barokah Jaya	Cor ferro	12	Dampyak
23	Karya Reksa Daya	Rekayasa	8	Dampyak
24	Fauzy Sobri	Cor non ferro	8	Talang
25	Presisi Utama	Rekayasa	10	Talang
26	Dwi logam	Pemesinan	8	Adiwerpa
27	Krd	Cor Ferro	8	Kota Tegal
28	Karya Yasa	Rekayasa Pemesinan	14	Lebaksiu

29	Frint Takaru	Rekayasa dan plat	14	Dampyak
30	Mulya Agung Jaya	Cor Ferro	8	Dampyak
31	Bintang Muda Utama	Rekayasa	7	Dampyak
32	Martabat Jaya Karya	Cor (ornamen mebel)	18	Adiwarna
33	Putra Bungsu	Cor non ferro	15	Talang
34	Tarmidi Putra	Cor Ferro (Peralatan Perumka)	15	Talang
35	Batara Karya	Cor Ferro pemesian	8	Adiwarna
36	Slamet Zaeni	Pelapis Logam	8	Adiwarna
37	H.S	Pemesinan dan plat	13	Talang
38	Zakaria	Cor Non Ferro	10	Pangkah
39	Sudiro	Pemesinan dan Plat	10	Adiwarna
40	Ika Logam	Cor non ferro	8	Talang .
41	Hasbi Putra	Pemesinan dan plat	10	Talang
42	Gustom	Pemesinan	10	Adiwarna
43	Sodikin	Pemesinan	10	Talang

44	Eva	Cor Non Ferro	10	Talang
45	Masruri	Pemesinan dan plat	22	Adiwerna
46	Makdum	Pemesinan dan plat	8	Adiwerna
47	Talang Mas	Plat	23	Talang
48	Sinar Kencana	Pemesinan	10	Adiwerna
49	Chiba	Pemesinan dan plat	10	Talang
50	Royen Steel	Rekayasa	10	Talang
51	Haptah	Pemesinan dan plat	10	Talang

(sumber : Unit informasi industri kecil Tegal)

B. POLA PENGEMBANGAN DAN PERATURAN YANG MENGATUR PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL.

B. 1. Pola pengembangan di Indonesia.

Pembinaan pengusaha kecil yang telah dilakukan oleh Pemerintah merupakan sarana yang ideal untuk meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta pengusaha kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa arahan fundamental untuk mencapai kesempatan berusaha tercantum dalam:

Sila ke V dari Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Arahan selanjutnya tertuang pada pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Di dalam pasal (33) ayat 1 yang menyatakan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”. Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua warganegara mempunyai hak yang akan dijamin oleh Undang-undang untuk menjunjung tinggi haknya. Karena hak yang sama tersebut maka bangsa Indonesia mempunyai kesempatan dalam segala usahanya sebatas tidak bertentangan dengan peraturan.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, menurut perkembangan Politik Hukum yang ada di Indonesia, dimana konsep hukum terrealisasikan dalam Ketetapan MPR RI No XXI/MPR/1993 tentang GBHN bahwa dalam perkembangan politik hukum di Indonesia dimana dalam pembentukannya, hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk Hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku Produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggantian produk Hukum kolonial dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan , serta ditunjang oleh sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hukum yang mantap.

Pembangunan disektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi, dengan tetap memperhatikan pembangunan disektor lain. Sektor industri dibedakan antara industri besar dan industri sedang, serta industri kecil dan industri rumah tangga. Menurut catatan dari Biro Pusat Statistik (BPS) industri besar adalah

perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang mempunyai tenaga kerja antara 20 orang sampai 99 orang, industri kecil dengan tenaga kerja antara 5-19 serta tenaga kerja 1 sampai 4 orang untuk industri rumah tangga.

Selanjutnya prinsip pengembangan Industri Kecil disesuaikan dengan UU no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang ditentukan lewat pemberdayaan Usaha Kecil dengan tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tapi pada dunia usaha dan masyarakat.

Pola pengembangannya ditentukan lewat:

1. Pemberdayaan, tercantum pada:

- pasal 1 ayat 3 UU No 9 Tahun 1995:

“pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”

- pasal 3 UU No 9 tahun 1995:

“pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas azas kekeluargaan”

- pasal 4 UU No 9 Tahun 1995:

“Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan:

- a). menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- b). meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional”.

UPT-POSTAL UMUM

2. Pembinaan dan pengembangan tercantum pada:

- pasal 14 UU No 9 Tahun 1995
- pasal 15 UU No 9 Tahun 1995
- pasal 16 UU No 9 Tahun 1995
- pasal 17 UU No 9 Tahun 1995
- pasal 18 UU No 9 Tahun 1995
- pasal 19 UU No 9 Tahun 1995, dan
- pasal 20 dari UU No 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil..

3. Pasal 14 UU No 14 Tahun 1995:

“Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan
- b. pemasaran
- c. sumber daya manusia
- d. teknologi

4. Pasal 15 UU No 15 Tahun 1995:

“Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dengan:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- b. meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan”.

5. Pasal 16 UU No 9 Tahun 1995:

“Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik didalam maupun diluar negeri dengan:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran

- c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. memasarkan produk Usaha Kecil”.

6. Pasal 17:

“Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan, dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dengan:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil;
- d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi Usaha Kecil.”

7. Pasal 18 UU No 9 Tahun 1995:

“Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d dengan:

- a. meningkatkan kemampuan dibidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan dibidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil”.

8. Pasal 19 UU No 9 Tahun 1995:

1. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 14, yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya, dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha kecil yang bersangkutan.
2. Ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagaimana

- dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

9. Pasal 20 UU No 9 Tahun 1995:

1. Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
2. Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada Usaha Menengah.
3. Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan.

B.1.2. Model Pembinaan di Indonesia.

Model pembinaan yang ada ditentukan melalui:

- a. Penciptaan iklim usaha.
- b. Pembinaan dan pengembangan.
- c. Pembinaan dan jaminan.
- d. Kemitraan¹⁷

a. Penciptaan Iklim Usaha

Penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil dilakukan melalui penetapan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- pendanaan
- persaingan
- prasarana
- informasi
- kemitraan

- perizinan usaha
- perlindungan

b. Pembinaan dan pengembangan terhadap industri kecil, meliputi :

- produksi dan pengolahan
- pemasaran
- sumber daya manusia dan teknologi

c. Pembiayaan dan jaminan, meliputi :

- kredit perbankan
- modal ventura
- pinjaman BUMN
- hibah

d. Kemitraan, meliputi :

- inti plasma
- sub kontrak
- dagang umum
- waralaba
- keagenan
- bentuk-bentuk lain¹⁸

Di Tegal penerapan ke-empat metode tersebut diatas (penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan jaminan dan kemitraan) tentu saja baru sebagian diterapkan, apalagi untuk daerah-daerah yang masih memerlukan perhatian dibidang industri. Beberapa daerah yang mungkin sudah memakai metode

¹⁷ Pemberdayaan usaha kecil menengah, 1997, Departemen Perindustrian

¹⁸ Pasal 27 Undang-Undang No, 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

inipun belum seluruhnya hanya beberapa ketentuan yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing

B.1.3. Alternatif Pendekatan di Indonesia

Agar metode-metode tersebut dapat dilaksanakan, perlu dibantu dengan pendekatan-pendekatan yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan sektor usaha kecil yaitu:

- pertama : pola keterkaitan dan kemitraan antara industri kecil dan industri besar.
- kedua : menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya sektor usaha kecil
- ketiga : peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Berbagai alternatif pendekatan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dapat dilakukan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek dilakukan terutama dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan favourable bagi usaha kecil. Pengembangan jangka panjang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan pola keterkaitan dan kemitraan antara industri kecil dan industri besar masih dalam pembicaraan pengembangannya, karena walaupun di Indonesia sudah banyak dilaksanakan (berkembang di Indonesia), namun banyak ditemui kegagalan dikarenakan tidak dipenuhinya prinsip yang mendasari kemitraan yaitu saling membutuhkan. Kerjasama antar keduanya didasarkan pada belas kasihan industri besar pada industri kecil, dimana industri kecil merasa selalu diberi sehingga hubungan kemitraan diantara mereka kurang harmonis.

Selanjutnya di dalam penjelasan UU no. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil pada penjelasan umum alinea ke-empat :

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Hal ini disebabkan karena usaha kecil dapat memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional khususnya di bidang ekonomi.

Begitu pentingnya peranan usaha kecil ini sehingga perlu diberikan perlindungan dan pembinaan yang tidak diberikan kepada usaha menengah dan usaha besar sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut di atas. Dalam rangka perlindungan dan Pembinaan Usaha Kecil tersebut, Menteri Tenaga Kerja juga telah menanggapinya dengan menetapkan Usaha Kecil, termasuk Koperasi sebagai program utama mengatasi pengangguran dalam PJPT II.¹⁹

B. 1.4. Pola Pengembangan Industri di Jawa Tengah.

Menurut hasil penelitian perkembangan kegiatan bidang industri di Jawa Tengah sampai akhir Pelita V terasa lamban antara lain lemahnya upaya menarik investasi industri, dimana keterbatasan lahan pertanian dan laju pertumbuhan sangat pesat sehingga

¹⁹ Abdul Latief, 1993 : Masalah pengangguran dan Pemecahannya di Indonesia, makalah disampaikan pada Kongres ISEI di Surabaya, 21-23 Nopember 1993.

menuntut dikembangkannya industrialisasi secara optimal terutama menyangkut jenis industri olahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik para penanam modal bidang industri Jawa Tengah antara lain dengan cara menumbuhkan iklim investasi melalui pemberian kepastian lokasi bagi industri pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang serta berbagai kemudahan yang lain.

Seperti yang telah digariskan pada Pelita VI bahwa pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan agar dapat mengejar angka pertumbuhan ekonomi nasional yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut sektor industri harus dirangsang dan dikembangkan mengingat lahan pertanian di Jawa Tengah terbatas.

Perusahaan industri besar dan sedang di Jawa Tengah pada tahun 1998 tercatat 8,65% dari perusahaan yang ada dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 557.880.000 orang, sehingga dibanding dengan tahun sebelumnya meningkat antara 2,36%(tahun 1998 6,18%)

Keadaan yang sama menunjukkan bahwa nilai output industri besar dan sedang mencapai 29,40 triliyun, sehingga naik 58% dari tahun 1997. Hal tersebut diikuti dengan Nilai Tambah Brutto(NTB) atas dasar harga pasar sebesar 45,36% dan 5,86 trilyun rupiah pada tahun 1997 menjadi 8,52 trilyun rupiah. Nilai tambah terbesar dicapai oleh industri tekstil pakaian jadi dan kulit sebesar 2,76 trilyun, dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak 143.000 orang.

Menurut Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, perusahaan industri kecil dan menengah tahun 1999 mencapai 640.000 perusahaan atau meningkat 6,22% dibanding dengan tahun sebelumnya. Tenaga kerja yang diserap sebesar 2,53 juta orang . Dibandingkan dengan tahun 1998 naik 0,83%. Nilai produksi terbesar dari industri kecil tersebut diperoleh dari industri hasil

pertanian dan kehutanan(44%), disusul industri logam mesin dan kimia aneka (39%), kemudian industri aneka sebanyak 17%.

Nilai investasi industri kecil dan menengah yang ditanamkan di Jawa Tengah tahun 1999 sebesar 1,01 triliun rupiah atau naik sebesar 4,97% dari tahun 1998(960 triliun). Investasi tersebut terbagi dalam industri hasil pertanian dan kehutanan (43,20%), indutri aneka 33,50%, serta industri logam mesin dan kimia 23,30%.

Dengan kondisi tersebut tercatat beberapa hal :

1. Perlu peningkatan berbagai macam industri, terutama industri logam, mesin, tekstil dan lain sebagainya yang tidak saja berorientasi pada pemasaran lokal tetapi harus sudah mulai diarahkan pada ekspor.
2. Pada kota-kota pusat pertumbuhan yang penduduknya sudah padat harus direncanakan lokasi industri yang tepat untuk menarik penanaman modal, dengan pengaturan tata ruang yang efisien serta fasilitas yang memadai sehingga dapat menghemat biaya.
3. Faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi peningkatan industri antara lain tenaga kerja trampil, tersedianya modal, inisiatif para pengusaha, tersedianya bahan mentah, pemasaran, iklim yang menunjang (nasional maupun internasional) fasilitas (sarana) dan infrastruktur (prasarana) perlu ditingkatkan.
4. Harus direncanakan adanya penyebaran lokasi/daerah wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II di Jawa Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Untuk mempercepat pemerataan pembangunan mengingat bahwa tiap-tiap daerah Tingkat II di Jawa Tengah memiliki penduduk hampir 1 juta jiwa atau lebih.

- Tiap Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ternyata memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang layak untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
- Dengan banyak wilayah-wilayah industri maka terbuka alternatif lokasi bagi para penanam modal dan dapat dicegah kemungkinan manipulasi industri.

Dari beberapa hal diatas Pemerintah (Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil) telah membuat langkah- langkah pembinaan sebagai berikut:

1. mengembangkan kegiatan pengusaha kecil yang sudah ada dengan:

- inventarisasi data pengusaha kecil
- studi kelayakan
- diklat dan magang
- penggalangan lembaga pendukung
- pembinaan usaha
- monitoring dan evaluasi

2. terobosan baru melalui pilot proyek terutama bidang agro industri dan industri kecil pedesaan, mencakup tahapan sebagai berikut:

a). tahap persiapan:

- studi peluang pasar
- studi potensi suplai

b). tahap pelaksanaan:

- pemasyarakatan konsep
- identifikasi plasma inti

- pembinaan calon usaha kecil pedesaan
 - penggalangan lembaga pendukung
 - studi kelayakan usaha
 - pendirian pilot proyek
 - pembinaan usaha
- c). tahap monitoring dan evaluasi
- d). tahap penyempurnaan konsep
- e). tahap menjadikan program nasional²⁰

Adapun target pengusaha kecil secara umum tertera pada bagan dibawah ini

Propinsi/ D.I	Perdagangan	Industri	KPL	J U M L A H		
				Aneka usaha	PK	KELOMPOK
DKI Jaya	9.619	745	362	3.162	13.000	270
J a b a r	12.388	5.007	1.890	3.100	21.577	432
J a t e n g	29.432	17.941	1.555	3.515	52.443	1.849
Yogyakarta	3.613	2.162	787	1.733	8.295	166
J a t i m	18.687	13.895	1.345	3.784	28.831	577
K a l b a r	3.479	320	334	2.893	6.226	125
K a l t e n g	2.205	446	352	556	3.559	71
K a l s e l	4.187	1.058	324	305	6.666	133

²⁰ petunjuk kebijaksanaan Dept PPPK Jawa Tengah, th 1993

Kaltim	4.187	324	201	167	4.879	90
<hr/>						
JUMLAH	79.629	41.890	6.390	18.415	146.364	2.929

(Sumber: Dept Kop dan PPPK Jawa Tengah 1994\1995)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah menempati jumlah terbesar baik dari sektor perdagangan (29.432) ataupun industrinya (17.941), sehingga program pembinaan pada pengusaha kecil juga dengan target terbesar untuk Indonesia.

Adapun program pembinaan pengusaha kecil tangguh adalah :

Propinsi/DI	Perdagangan	Industri	KPL	Aneka usaha	Jumlah PK	Kelompok
DKI Jaya	3172	67	133	1832	4404	88
Jawa Barat	4801	2417	481	1810	7917	158
Jawa Tengah	9782	3658	452	1156	14860	299
Jawa Timur	1191	852	323	561	2972	59
Yogyakarta	3432	3198	166	1212	7991	168
Kalbar	1147	38	63	704	1944	39
Kalteng	727	43	105	104	1859	21
Kalsel	1354	178	83	127	1742	35
Kaltim	1354	31	90	55	1530	31
Jumlah	26151	18466	6849	6849	44402	898

Sumber : Dept Koperasi dan PPK

Dari data diatas dapat diketahui bahwa target pembinaan pengusaha kecil tangguh di Jawa Tengah sebanyak 14968 pengusaha kecil yang berarti bahwa;

- Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki potensi terbesar dibanding provinsi lainnya di Indonesia
- Target pembinaan lebih besar dan kompleks
- Jumlah aneka industri tidak terlalu besar, dibandingkan dengan jumlah aneka industri di Jawa Timur, apalagi dengan Jawa Barat dan DKI Jaya, tetapi dengan industri tersebut dapat menyerap tenaga yang terbesar juga kelompok indstri yang jumlahnya paling banyak.

B.3. Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Tegal.

Industri yang ada di wilayah Kabupaten Tegal bilamana dilihat dari pembagian kelompok, cabang, jenis dan komoditi adalah sebagai berikut :

- Industri mesin, Logam Dasar dan Elektronika.
- Industri Kimia Dasar.
- Aneka Industri.
- Industri Kecil.

Berdasarkan data tahun 1995 jumlah seluruh perusahaan industri yang ada di Kab. Dati II Tegal 26.246 unit usaha dengan tenaga kerja 95.143 orang dengan perincian sebagai berikut :

KELOMPOK INDUSTRI	JUMLAH	JML TENAGA KERJA
Industri mesin, logam dasar dan elektronika.	3	103
Industri kimia dasar.	3	130
Aneka industri.	28	7.253
Industri kecil	27.982	87.657

Sumber: Kabupaten Tegal dalam angka, 1995.

Kelompok industri kecil sebanyak 27.982 unit usaha tersebut diatas, apabila kita perinci akan terlihat pada bagan dibawah ini:

JENIS USAHA	JUMLAH UNIT USAHA
Minuman	578
Pertanian	8.865
Aneka Industri	11.102
Kimia dasar	4.484
Logam mesin dan elektronika	2.953
JUMLAH	27.982

Data tahun 1995 tersebut penulis kemukakan disini, karena data tahun- tahun sebelumnya serta data tahun berikutnya perkembangan industri kecil tidak banyak bertambah. Hal ini tidak saja terlihat di Tegal, akan tetapi untuk wilayah Jawa Tengah juga kita ketemukan data yang serupa.

Berikut ini merupakan tabel dari perkembangan jumlah industri yang ada di Jawa Tengah selama tiga tahun yaitu mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 1995.

Jumlah Industri Kecil Jawa Tengah tahun Tahun 1993 s/d 1995 :

Kelompok Industri	1993	1994	1995
Industri Logam Mesin dan Elektronika			
- Menengah dan Besar	135	148	148
- Kecil	23315	23762	24225
Industri Kimia (InKim)			
- Menengah dan Besar	79	97	99
- Kecil	57172	58964	60781
Industri Aneka (IA)			
- Menengah dan Besar	240	262	267
- Kecil	243567	245354	247316
Industri Hasil Pertanian (IHP)		D	
- Menengah dan Besar	76	85	91
- Kecil	293776	295227	296703
Jumlah			

- Menengah dan Besar	533	592	605
-Kecil	617830	623297	629025
-Total	618363	623889	629630

Sumber : Kanwil Perindustrian Propinsi Jawa Tengah

Dari data tersebut menunjukkan bahwa industri kecil di Jawa Tengah dalam 3 tahun selalu berkembang , dari 617830(1993) menjadi 623291(1994) hingga 629025.

(1995). Lebih jauh lagi bisa kita perinci dengan melihat jumlah dari Industri Kecil pada masing-masing daerah khususnya di Kabupaten Tegal dengan data / tabel dibawah ini.

Banyaknya Industri di Kabupaten\ kotamadya di Jawa Tengah Tahun 1995.

No	Kabupaten / Kodya	Industri Logam dan Elektronika (ILME)	Industri Kimia (INKIM)	Industri Aneka (IA)	Industri Hasil Pertanian (IHP)
Kabupaten :					
1	Cilacap	149	1571	9175	17522
2	Banyumas	685	1736	5563	32666
3	Purbalingga	954	1869	10407	12381
4	Banjarnegara	427	850	13657	13902
5	Kebumen	271	2191	17681	22561
6	Purworejo	148	2152	10407	12381

7	Wonosobo	227	94	2968	7374
8	Magelang	690	2278	9394	13948
9	Boyolali	2891	2371	7403	12458
10	Klaten	2422	3641	5619	11425
11	Sukoharjo	134	833	6105	7236
12	Wonogiri	149	3126	6694	5236
13	Karanganyar	1989	1681	4758	10476
14	Sragen	263	1976	12064	12229
15	Grobogon	1008	2968	6642	3847
16	Blora	318	3078	8209	5597
17	Rembang	274	2083	7043	6211
18	Pati	180	2477	149	7363
19	Kudus	648	1613	5560	6586
20	Jepara	127	1420	7305	4336
21	Demak	193	2256	2198	3750
22	Semarang	80	781	5854	7342
23	Temanggung	46	1377	4807	10949
24	Kendal	1263	2638	6277	5574
25	Batang	249	467	3424	12186
26	Pekalongan	625	2413	25284	5339
27	Pemalang	678	2652	8607	2535
28	Tegal	2956	4516	11221	8866
29	Brebes	650	2225	1207	5469

	Kotamadya					
30	Magelang	257	125	557	965	
31	Surakarta	1218	200	4812	3061	
32	Salatiga	71	24	649	887	
33	Semarang	1414	650	1384	1431	
34	Pekalongan	228	266	8851	1539	
35	Tegal	343	94	1881	1095	
	Jumlah	1995	24225	60781	247316	296703
		1994	23762	58954	245354	295227
		1993	23315	57172	243567	293776

Sumber : Kanwil Perindustrian Jawa Tengah

Berikut ini tabel mengenai banyaknya industri kecil yang ada di Kabupaten Tegal mulai tahun 1994 sampai dengan 1999

JUMLAH INDUSTRI KECIL MULAI TAHUN 1994 – 1999 DI KABUPATEN TEGAL

Tahun	Jumlah Unit
1994	27795
1995	27985
1996	27982
1997	28316
1998	28473
1999	29404
Jumlah	1669946

Sedangkan khusus industri kecil logam dan mesin seperti tersebut dibawah ini:

JUMLAH INDUSTRI LOGAM DAN MESIN DI KABUPATEN TEGAL

Mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 1999.

Tahun	Jumlah Unit Usaha
1994	2950
1995	2953
1996	2973
1997	2981
1998	3000
1999	3219
Jumlah	18076

Sesuai dengan data-data tersebut diatas, akan terlihat bahwa jumlah industri yang ada di Kabupaten Tegal mulai tahun 1994 sampai dengan 1999 selalu mengalami peningkatan . Pada tahun 1995 dengan jumlah industri logam dan mesin sebanyak 2953 telah mengalami peningkatan, walaupun belum berarti tetapi cenderung kearah kemajuan industri kecil, yaitu meningkat sebesar 0,1%.

Hal yang demikian dimungkinkan karena:

- mulai tahun 1994 telah dirasakan pentingnya keberadaan industri kecil

- sejak tahun 1995 dengan telah diundangkannya Undang-undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang isinya antara lain membantu dan memberi peluang bagi industri kecil, ternyata mengundang masyarakat untuk mendirikan usaha-usaha kecil sesuai dengan azas dan falsafah bangsa Indonesia.

Tahun 1996, terlihat terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator seperti jumlah kegiatan usaha, tenaga kerja serta indikator yang lain. Jumlah tenaga tenaga kerja tercatat meningkat sebesar 1,73%

Tahun 1997, sektor industri secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup pesat, walaupun jumlah industri tidak terlalu meningkat (hanya sekitar 0,27%), namun jumlah tenaga kerja tercatat telah mencapai 129.178 orang, yang berarti mengalami peningkatan sekitar 8,96% dibanding tahun 1996 yang tercatat sebesar 118.770 tenaga kerja.

Tahun 1998, sektor industri secara umum mengalami keadaan yang cukup memprihatinkan akibat dari dampak krisis ekonomi, namun data yang ada pada industri kecil tidak mengalami penurunan, hal mana dikarenakan:

- beberapa industri besar yang merubah menjadi industri kecil sebagai akibat kurangnya modal
- industri kecil yang ada tidak banyak memerlukan tenaga kerja, sehingga tidak berpengaruh pada pembiayaan untuk tenaga kerja.

Tahun 1999, sector industri secara berangsur-angsur sudah menunjukkan kecenderungan membaik setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, hal ini dapat

dilihat indikatornya yaitu jumlah unit usaha maupun jumlah tenaga kerja pada setiap kelompok industri mengalami kenaikan, terutama dalam kelompok industri logam mesin untuk jumlah tenaga kerjanya.

Selanjutnya menurut Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2000 tercantum pada huruf A (antara lain):

“mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum”

Point 2 menyatakan:

“menata sistem hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Budaya Hukum yang ada di Indonesia banyak diwarnai dengan peranan Hukum Adat tradisional, pola perilaku masyarakat serta upaya untuk tetap melestarikan kebiasaan-kebiasaan setempat.

Selanjutnya ditetapkan dalam point ke- 3, bahwa:

“mengembangkan peraturan perundang-perundangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan Nasional”

Budaya Hukum di semua lapisan masyarakat mempunyai corak yang berlainan seperti halnya budaya yang ada di Masyarakat Tegal yang menggambarkan pola tingkah laku masyarakat khususnya masyarakat industri dimana para pengusahanya terlalu santai dalam mencari nafkah sesuai dengan falsafah mereka bahwa rejeki itu akan datang sendiri. Budaya yang berkembang di masyarakat dijiwai dengan budaya di lingkungan kelompok-kelompok masyarakat yang berkembang mulai dari masyarakat Bahari (masyarakat niaga yang menjalankan perdagangan secara global), berkembang menjadi masyarakat Priyayi dan masyarakat Pedagang), kemudian kembali pada masyarakat niaga serta masyarakat yang berwiraswasta.

Disamping kebudayaan, masalah yang menyangkut perkembangan perekonomian diatur dalam point 7 pada arah kebijaksanaan tentang hukum, antara lain:

“mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.”

Dalam mencapai usaha untuk peningkatan kesejahteraannya Pengusaha kecil banyak mengalami. Kendala-kendala yang menghambat usaha-usaha mereka. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Kendala internal, meliputi kualitas sumber daya manusia yang masih rendah sehingga menyebabkan :
 - Lemahnya akses dan pangsa pasar.
 - Lemahnya permodalan dan akses terhadap sumber modal.
 - Terbatasnya kemampuan penguasaan teknologi.
 - Lemahnya organisasi dan manajemen.

- Terbatasnya jaringan usaha dan kemitraan.
- b. Kendala eksternal yang mencakup :
- Iklim usaha yang kurang kondusif.
 - Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
 - Kecenderungan usaha besar membentuk jaringan usaha ke hulu dan ke hilir
 - Pembinaan kurang terpadu.²¹

Untuk menangani atau memecahkan masalah tersebut Pemerintah telah melakukan berbagai upaya hukum yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan berusaha dari para Pengusaha kecil. Pedoman mana tertuang dalam Keputusan Menteri yang tindak lanjutnya dilakukan dengan Keputusan-keputusan di bawahnya secara konsisten.

Pembinaan juga dimuat dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal BUMN Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

No. Kep.155/BU/1994.
02/SKB/PPK/X/1994.

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan dikeluarkannya Keputusan ini tertuang pada Pasal 1 :

1. Untuk lebih mengefektifkan penyaluran dana dan pelaksanaan pembinaan oleh BUMN kepada Usaha Kecil dan Koperasi.
2. Untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

3. Mewujudkan Usaha Kecil dan Koperasi yang mandiri dan tangguh.
4. Mewujudkan hubungan kemitraan antara BUMN dengan Usaha Kecil dan Koperasi.

Realisasi dari poin 2 tersebut pelaksanaan pembinaannya diwujudkan dalam pasal (10) ayat 2 Surat Keputusan Bersama yang isinya antara lain Pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.

Pasal 10 ayat (2) tersebut mengatur :

- a. Forum Koordinasi Pusat yang dibentuk oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- b. Forum Koordinasi Daerah Tingkat I dibentuk oleh Gubernur Dati I atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. Forum Koordinasi Daerah Tingkat II, dibentuk oleh Bupati/ Walikota/madya Daerah Tk II.

Forum ini bertujuan :

1. Merumuskan kebijaksanaan umum Pembinaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Menyusun dan mengajukan alokasi dana Pembinaan dan Rencana penetapan BUMN.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh BUMN.

Sebagai penunjang SK menteri tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 518/164/1994 tentang Forum Koordinasi Pembinaan

²¹ Kebijakan/Petunjuk Depkop dan PPK Kantor Wilayah Prop. Jateng, 1993, hal.12.

Pengusaha Kecil dan Koperasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, forum tersebut bertugas :

1. Meningkatkan koordinasi yang terarah dan terpadu dari semua instansi/lembaga terkait dalam kegiatan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi guna mewujudkan Pengusaha kecil tangguh, menengah dan modern serta Koperasi yang kuat dan mandiri.
2. Sebagai fasilitator dari Pembinaan Usaha-usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN dengan bidang tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan.
3. Mengevaluasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan operasional Pembinaan dan pengembangan Pengusaha Kecil dan Koperasi sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu dipandang perlu.
4. Melaporkan hasil kegiatan tersebut (1), (2) dan (3) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Peraturan tersebut terlihat bahwa Departemen Koperasi mempunyai peranan yang penting di dalam Pembinaan yaitu untuk mencapai tujuan terciptanya Pengusaha Kecil tangguh, menengah dan modern serta terbentuknya Koperasi yang kuat dan mandiri.

Dalam Forum Koordinasi pada SK Gubernur tersebut diatas terlihat bahwa Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (sebagai Ketua) bekerja sama dengan instansi-instansi terkait antara lain Departemen Perdagangan, Perindustrian, Bank Indonesia, BKKBN serta Departemen Tenaga Kerja.

Suatu hal yang menarik untuk dikaji disini adalah digunakannya Konsep Hukum (Konsep Yuridis) untuk mengembangkan usaha kecil dalam lingkup konsep ekonomi, sehingga akan tampak sekali bahwa hukum semakin berperan dalam substansi-substansi ekonomi sebagai arah pengembangan kehidupan sosial ekonomi yang ideal.

Penggunaan hukum sebagai arah untuk mencapai tujuan ini dilakukan karena secara teknis hukum dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ; .

Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas dalam bidang masyarakat.
Hukum merupakan sarana Pemerintah untuk menerapkan sanksi.
Hukum sering dipakai Pemerintah sebagai sarana untuk melindungi dirinya dalam melawan kritik.
Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.²²

Penggunaan hukum dilaksanakan melalui pendekatan-pendekatan yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan sektor usaha kecil dengan bentuk pengembangan sebagai berikut :

1. Pola keterkaitan dan kemitraan.

Apabila hukum dilihat dalam implementasinya dalam masyarakat maka :

“ Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri yaitu Hukum akan melayani kebutuhan anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri Oleh karena itu hukum sebagai suatu sarana semakin aktif terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah²³

Dewasa ini Pembinaan ditekankan pada departemen Koperasi yang menitik beratkan pada masalah pendanaan, karena untuk mendorong kegiatan dan

²² Sunggono : Hukum dan Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, 77

²³ Sunggono, loc.cit, 3



perkembangan ekonomi perlu potensi, usaha agar Pengusaha kecil menjadi tangguh dan mandiri, sehingga perlu menumbuhkan kemitraan antara BUMN dengan Usaha Kecil serta Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Surat keputusan Menteri yang mendasar hal tersebut ialah : Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No :316/Kmk.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, tentang : Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan dana dari bagian Laba BUMN.

Pasal 4 menyebutkan bahwa : Pembinaan BUMN terhadap Usaha kecil dan Koperasi dapat berupa bantuan :

- a. Pendidikan, pelatihan, Penelitian, dan Pemegangan Untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen serta ketrampilan.
- b. Pinjaman modal kerja dan investasi dengan tingkat bunga yang disesuaikan dengan kemampuan mitra binaan untuk meningkatkan produksi dan penjualan/omzet yang ditetapkan oleh direksi BUMN.
- c. Pemberian jaminan dalam rangka memperoleh kredit perbankan atau transaksi dengan pihak ketiga.
- d. Pernyataan pada Perusahaan Modal Ventura di Daerah Tingkat I yang membantu permodalan dan pinjaman kepada usaha kecil dan Koperasi .

Dengan Konsep Pedoman tersebut masalah yang ada sekarang ialah Pengusaha Kecil yang bagaimanakah Pembinaan tersebut diberikan atau siapa yang dapat digolongkan sebagai Pengusaha Kecil yang harus dilindungi dan dibina.

Kriteria yang ada bila kita dasarkan pada penjelasan Undang-undang No 9 tahun 1995 maka Pengusaha kecil yang harus dibina ialah :

1. Usaha Informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung.
2. Usaha kecil tradisional yaitu usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan atau berkaitan dengan seni dan budaya .

Berdasarkan pada kriteria tersebut diatas serta sesuai dengan pembatasan di Kabupaten Tegal tercatat para pengusaha Informal dalam pembuatan barang-barang Industri seperti pisau dapur, gergaji, alat-alat pertanian, cangkul, dan lain-lain.

Sedangkan Industri tradisional yang merupakan seni budaya dan telah turun temurun dari nenek moyang masyarakat Tegal ialah pembuatan logam/kuningan, serta peralatan dapur yang lain dalam bentuk berukir-ukir serta bervariasi pahatan-pahatan sederhana. Pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam hal ini ialah yang harus dibina dan dilindungi.

.Dalam rangka meningkatkan pengusaha kecil yang mandiri dan tangguh sesuai dengan tujuan dari berbagai instansi masing-masing maka sesuai dengan dasar pelaksanaannya Pemerintah Daerah Tingkat II Tegal mengeluarkan Surat Keputusan Bupati no. 501/1539/ 1995 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Kabupaten Tegal. SK ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya SK Kepala Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Dati II Tegal No. 1678/KDK 11. 7/ PPK/IX/96 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kewirausahaan, antara lain dinyatakan tentang tugas kelompok kerja tersebut:

1. Menghimpun, mengklasifikasikan , mengolah dan menyimpan data tertulis tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan pada umumnya.
2. Bersama- sama dengan Forum Koordinasi Daerah Tingkat II menyusun konsep-konsep awal tentang kelembagaan kewirausahaan.
3. Menampung usulan, masukan dan kritik dari masyarakat tentang GNMMK, baik secara langsung maupun melalui Forum Koordinasi Daerah Tingkat II dan instansi yang lainnya.
4. membantu Forum Koordinasi Daerah Tingkat II dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan departemen/ instansi terkait gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan dan urusan kesekretariatan.
5. Menyiapkan konsep awal penjabaran arahan dari Forum Koordinasi Daerah tingkat II
6. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Daerah Tingkat I dan Forum Koordinasi Daerah Tingkat II serta dengan berbagai lembaga yang terkait dalam kegiatan GNMMK

Dasar dari SK ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Tengah selaku Ketua Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Propinsi daerah tingkat I Jawa Tengah No. 1748/KWK/VIII/1996 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kewirausahaan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dalam surat keputusan tersebut antara lain dicantumkan tentang tugas kelompok tersebut ialah:

1. Menghimpun, mengklasifikasikan, mengolah dan menyimpan data tertulis tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK) dan urusan kesekretariatan.
2. Bersama dengan Forum Koordinasi Daerah Tingkat II menyusun konsep-konsep awal tentang kelembagaan kewirausahaan.
3. Menampung usulan, masukan dan kritik dari masyarakat tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, baik secara langsung maupun melalui Forum Koordinasi Tingkat II dan instansi yang lain.
4. Membantu Forum Koordinasi Daerah Tingkat II dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait pada Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan dan urusan kesekretariatan.
5. Menyiapkan konsep awal penjabaran arahan dari forum koordinasi Tingkat II dengan Forum Koordinasi Tingkat I serta dengan berbagai lembaga yang terkait dalam kegiatan GNMMK
- 6 .Melakukan koordinasi dengan Forum Kooedinasi Daerah Tingkat I dan Forum Daerah Tingkat II serta dengan berbagai lembaga yang terkait dalam GNMMK.

Bila kita hubungkan antara kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada dalam teori yang disebut diatas serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh daerah tingkat I, maka di Kabupaten Tegal telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan menyesuaikan dengan kondisi daerah. Ketentuan mana tercantum pada SK no. 501/4083/1994 tentang pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil

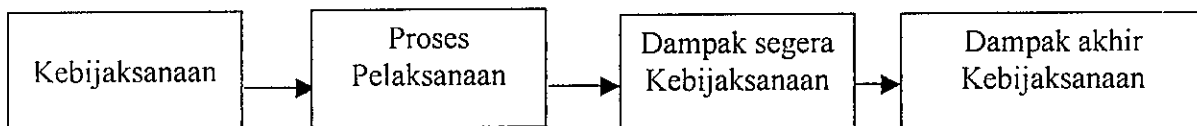
dan Koperasi Kab. Dati II Tegal. Sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur maka SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan guna menjadi Pengusaha Kecil yang tangguh dan modern serta koperasi yang kuat dan mandiri.

C. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PEMERITAH.

Berikut dikemukakan sedikit gambaran mengenai implementasi kebijakan pemerintah .

Implementasi kebijakan Pemerintah merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Dengan demikian upaya yang dipakai dalam implementasi adalah tindakan yang sah dari Pemerintah berupa produk perundang-undangan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Mengenai proses implementasi William dan Ermore menggambarkan dalam skema sebagai berikut :



1. Kebijakan.

Proses implementasi kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan-tujuan publik telah ditetapkan. Tujuan yang ada dalam pembinaan pengusaha kecil telah disebutkan baik dalam Pelita maupun GBHN yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Tujuan-tujuan yang ada kemudian dijabarkan pada surat keputusan

Menteri Koperasi dan PPK RI no. 63/Kep/M/1994 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Repelita VI. Tujuan Pembinaan tersebut tercantum pada pasal (1) ialah :

- a. Tumbuh dan berkembangnya Koperasi sebagai Badan Usaha yang mandiri dan Pengusaha Kecil yang Tangguh dan Modern dalam Perekonomian Nasional.
- b. Tumbuh dan berkembangnya Koperasi Dan Pengusaha Kecil untuk berperan dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat.
- c. Tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan Pengusaha Kecil untuk berperan dalam memperkuat struktur Perekonomian Nasional.

Dalam program kebijakan public pada umumnya meliputi penyusunan acara-acara tertentu dari tindakan-tindakan yang harus dijalankan yaitu mengenai tatacara yang harus diikuti dalam pelaksanaan, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan proyek-proyek yang kongkret berdasarkan pada kehendak pelaksanaannya. Kalau konsep pembinaan dalam Surat Keputusan Menteri tersebut diatas menitik beratkan pada tumbuh dan berkembangnya Kopersasi dan Pengusaha Kecil hingga memajukan perkembangan ekonomi Nasional, maka harus ada acara-acara dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaksana yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Tingkat I beserta instansi-instansi yang terkait.

2. Proses Pelaksanaan.

Telah disebutkan bahwa pelaksana pembinaan adalah Daerah Tingkat I dimana dalam pelaksanaannya mencakup keseluruhan kegiatan yang terpadu antara lembaga-lembaga Pemerintah dalam berbagai jenjangnya. Pelaksana di daerah selain berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada, juga perkembangan di daerah yang secara alamiah usaha

tersebut akan tumbuh melalui tahapan pemula, bertumbuh dan berkembang, dan kemudian menjadi mantap. Dalam proses ini usaha yang paling banyak menghadapi kegagalan adalah pada tahapan pemula, dimana usaha yang dilaksanakan masih bersifat coba- coba seperti tumbuh nya jamur dimusim hujan, dimana pada umumnya usaha ini merupakan industri rumah tangga yang sifatnya sementara .

3. Dampak segera kebijaksanaan.

Dari proses implementasi tersebut diatas yang dimulai dengan suatu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan, maka terlihat berjalannya kebijaksanaan meresap didalam kehidupan Pengusaha Kecil. Pengaruh dari kebijaksanaan tersebut membawa hasil yang terlihat pada policy performance dan dampak segera. Hasil dari dampak segera ini bisa kita lihat dengan bertambahnya unit-unit usaha khususnya industri kecil yang menyeluruh pada daerah-daerah industri. Apabila kita perinci pada tiga tahun terakhir ini yaitu pada tahun 1992-1995 unit industri kecil yang ada bertambah sebanyak 73.481 unit khususnya untuk daerah Jawa Tengah. Hal yang demikian tentunya akan menambah jumlah tenaga kerja yaitu dari 2.581.734 tenaga kerja menjadi 3.058.869 tenaga kerja, yang berarti pada sekitar 3 tahun terakhir ini tenaga kerja industri kecil di Jawa Tengah bertambah sekitar 477.135 tenaga kerja, atau bertambah sekitar 18,48% dan belum berarti bahwa tujuan peningkatan Pengusaha Kecil telah tercapai.

4. Dampak akhir kebijaksanaan

Hasil akhir kebijaksanaan yang disebut juga sebagai “ policy out come” atau “ policy impact” berupa tujuan akhir dari pembinaan tersebut yang didalam “Pokok- pokok

Kebijaksanaan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil “ Jawa Tengah tertuang pada “ terwujudnya pengusaha tangguh” dengan:

1. memiliki usaha yang efisien, sehat dan mandiri,
2. mampu menjadi unsure kekuatan ekonomi rakyat yang memberikan sumbangan besar ekonomi nasional.

Dampak akhir dari kebijaksanaan ini belum bisa kita lihat dengan karena hasil akhir biasanya dipengaruhi oleh beberapa factor , antara lain aktor- aktor pelaksana dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda antara aktor yang satu dengan aktor lainnya. Masing-masing aktor mungkin mempunyai kepentingan tertentu terhadap program atau isi dari kebijaksanaan Pemerintah yang telah dikeluarkan dimana masing- masing berusaha untuk mencapai tujuan tersebut sesuai kepentingan masing- masing. Para aktor yang ada apabila kita lihat pada SK Bupati tentang Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil tertanggal 3 Juli 1995 no. 501/i539/1995 dinyatakan bahwa masing- masing instansi yang mempunyai kepentingan dengan Pembinaan Pengusaha Kecil serta telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II antara lain:

a. Kantor Departemen Perdagangan..

Instansi ini merupakan aktor yang mempunyai urgensi dalam ketertiban pengusaha { baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil }, untuk mempunyai izin usaha dalam rangka ketertiban hukum dan khususnya bagi pengusaha kecil yang belum memerlukan izin usaha kantor perdagangan akan memberikan pembinaan berupa tata cara berusaha, peningkatan gerak usaha serta kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi apabila tidak ada izin usaha. Walaupun izin usaha tidak diwajibkan bagi pengusaha kecil sebagaimana Undang- Undang No 3 Tahun 1982 telah memberi kelonggaran pada pengusaha kecil,

tetapi diharapkan dengan adanya izin usaha mereka dapat memperoleh fasilitas- fasilitas, misalkan Kredit Usaha serta berbagai kemudahan- kemudahan dalam peningkatan status usahanya. Hal tersebut dikarenakan dalam criteria Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang izin usaha hanya menyebutkan khusus pada pada perusahaan kecil perorangan seperti tertuang pada pasal (6) ayat 1 huruf b:

“Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan ialah setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.”

Ijin ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah RI no. 13/1995 tentang ijin usaha industri yang dalam pasal (3) ayat 1 berbunyi :

“Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan untuk memperoleh ijin usaha industri.”

Dengan kemudian kemudahan-kemudahan yang ada bukan berarti meniadakan ijin usaha bagi industri kecil, melainkan dalam peningkatan keberadaan pengusaha kecil hendaknya melihat pada batasan-batasan yang terutang pada pasal-pasal dari peraturan tersebut diatas. Dalam kepentingan-kepentingan yang ada Departemen Perdagangan mungkin berbenturan kepentingan instansi lain dimana mempunyai tujuan utama yang sama dalam melaksanakan program masing-masing.

b. Kantor Departemen Perindustrian

Awal sebelum difungsikannya Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Departemen Perindustrian telah merintis pembinaan pada pengusaha kecil yaitu dengan pelatihan tenaga kerja serta pembinaan pada produk dan kualitas barang yang dihasilkan. Meskipun dalam melaksanakan tugasnya Departemen Perindustrian menyatukan

antara industri besar, menengah dan kecil, namun pembinaan pada pengusaha kecil dikhususkan, berhubung industri-industri besar dan menengah hanya memerlukan pemantauan sedangkan industri kecil lebih ditekankan pada pemikiran dan penanganan. Dalam pelaksanaan program tersebut Departemen perindustrian telah mendata jumlah pengusaha kecil yang mendaftarkan diri dan memerlukan pembinaan serta fasilitas-fasilitas dalam pengembangan usahanya. Pemberian pelatihan pada tenaga kerja pemantauan dari Departemen Perindustrian dalam hal penting dan tidaknya terhadap relevansi dan usahanya. Dewasa ini program tersebut juga dilaksanakan oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan versi yang lain yang diutamakan dengan metoda-metoda dan ceramah, sedangkan departemen perindustrian menekankan pada ketrampilan teknis dengan mendatangkan instruktur-instruktur dalam rangka peningkatan teknologi.

c. Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

Tujuan pembinaan antara ketiga Departemen tersebut sama, yaitu meningkatkan Pengusaha Kecil yang mandiri dan tangguh, perbedaannya dalam pelaksanaan tugas tugas masing-masing. Kalau pada Departemen Perdagangan Pembinaan dilaksanakan dengan memberi arahan yang mantap agar para Pengusaha Kecil mempunyai izin industri, pada Departemen Koperasi dan PPPK pembinaan difokuskan pada pendataan dengan mencari sedetail-detailnya Pengusaha Kecil dengan tanpa melihat keberadaan Pengusaha Kecil tersebut dengan tujuan mengupayakan kesatuan dan keberadaan Industri Kecil, baik individu-individu yang sudah tergabung dalam kelompok industri maupun yang masih mengawali industrinya di rumah, bahkan juga bagi individu-individu yang masih coba-coba dalam usahanya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar lewat penyaluran dana dari BUMN ataupun swasta yang telah terkait pada perjanjian. Penyaluran bantuan dana tersebut

diupayakan merata dapat dirasakan oleh para Pengusaha Kecil dan beban bunga yang tidak memberatkan. Disamping itu juga membina dalam penertiban administrasi perusahaan serta pengarahan pada peningkatan ketrampilan para Pengusaha Kecil. Untuk usaha Industri dan Perdagangan pada prinsipnya diperlukan izin-izin sebagai berikut:

1. Izin prinsip,

Suatu persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat untuk mendirikan perusahaan industri, atau disebut juga Persetujuan Prinsip Mendirikan Perusahaan Industri.

Suatu persetujuan yang dikeluarkan pemerintah Daerah setempat untuk mendirikan perusahaan industri, atau disebut juga Persetujuan prinsip Mendirikan Industri

2. Izin Penggunaan Tanah.

3. Izin ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, dengan persyaratan bangunan yang didirikan sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh kepala dinas, dengan ketentuan pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu tempat sekitarnya .

4. Izin gangguan.

Izin ini dikeluarkan oleh bagian Undang- Undang Gangguan pemda setempat yang wajib dimiliki perusahaan. Sebelum mengajukan permohonan izin ini, perusahaan wajib memiliki izin dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan izin dari Kelurahan setempat, serta mendapat persetujuan tidak keberatan dari tetangga terdekat .Izin gangguan ini wajib diperbarui setiap tiga tahun sekali jika usahanya masih dilanjutkan. Beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi diantaranya ialah:

- a). tempat usaha dan pekarangannya harus selalu bersih,
- b). hanya bukaa pada jam tertentu, tidak memnngganggu sekitarnya,

- c). menyediakan sarana pengaman seperti pemadam kebakaran, obat-obatan,
- d). tidak bising, pondasi kuat menahan getaran dan sebagainya.

5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, diperbarui setiap lima tahun sekali dan jika disetujui untuk melakukan usaha, pengusaha mmmenerima 3(tiga) bentuk surst:

- Surat Keputusan Menteri tentang pemberian SIUP,
- Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP),
- Surat Keterangan Identitas Pemilik SIUP.

6. Wajib Daftar Perusahaan.

Dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, paling lambat dilakukan tiga bulan setelah mulai menjalankan usaha, dan jika usaha masih akan diteruskan maka wajib didaftarkan kembali setiap lima tahun sekali.

7. Izin – izin Depertemen.

8. Dikeluarkan oleh tiap-tiap Departeman yang membawahi bidang usaha yang dijalankan, misalkan usaha pengolahan hasil pertanian waajib daftar ke Departemen Pertanian . Departeman Kesehatan untuk usaha yang menyangkut makanan, minuman dan obat- obatan, Departemen Pariwisata untuk biro- biro jjasa perjalanan yang masing- masing diajukan untuk kantor dinasnya.

Hal lain yang dicantumkan dalam SK Bupati No: 1678/KDK 11.7/ PPK/IX/1996 ini adalah membantu kelancaran forum koordinasi dengan adanya kelompok-kelompok kerja.

Kelompok- kelompok kerja tersebut adalah:

- bidang Pemasaran,
- bidang Permodalan,
- bidang Organisasi dan Manajemen,
- bidang Ketrampilan Teknik Produksi,
- bidang Kemitraan/Jaringan yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi/lembaga terkait.

Tugas tersebut diatas merupakan tanggung jawab dari Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil dalam memberikan pembinaan yang terarah dan terpadu dimana cara paling mudah, tepat, rutin dan selalu dilaksanakan adalah:

1. Ceramah

Ceramah dilakukan pada minggu ketiga setiap bulannya dengan materi:

- Peranan Pengusaha Kecil dalam pembangunan.
- Pengusaha Kecil dengan jangkauan dan hasil yang besar.
- Pentingnya usaha dalam negara yang membangun.

Ceramah dilaksanakan untuk peningkatan sumberdaya manusia, dimana dengan pelaksanaan yang rutin akan meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan berwiraswasta. Namun yang dirasa perlunya dilaksanakan dengan pendidikan dan latihan yang menunjang masalah praktek perusahaan, sebab belajar secara praktek akan lebih mudah dari pada menerima secara tertulis.

Pendekatan yang tepat untuk industri kecil disini ialah:

- sistem magang dengan berbagai bentuknya
- klinik usaha

- incubator bisnis
- konsultasi usaha

Kemampuan manajerial disini baik yang sifatnya seminar, pelatihan, kursus serta lokakarya yang semuanya menekankan pada sumber daya manusia sebagai salah satu kebutuhan pokok organisasi perusahaan baik dalam industri besar ataupun industri kecil yang semuanya telah disiapkan untuk menjawab tantangan masa depan.

Ceramah ini diberikan oleh:

- para pejabat dari Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
- perwakilan dari industri kecil menengah dan industri menengah yang ada di Kabupaten Tegal, antara lain:
 - a. PT Mahamotin
 - b. PT Sanmet Intermitra
 - c. CV Target
 - d. PT Matahari
 - e. CV Kurnia Teknik Pratama
 - f. PT Setia Kawan
 - g. CV Prima Karya

Sasaran/ peserta ceramah adalah:

- pengusaha kecil yang terdaftar di kantor Perindustrian/ Perdagangan
- pengusaha kecil yang tergabung dalam Lingkungan Industri Kecil
- kelompok-kelompok dalam sentra industri

- para pelajar klas III di Sekolah Menengah Industri Kerajinan Adiwerna

Pada kesempatan itu pula dipakai untuk acara penyampaian laporan hasil dari pembinaan yang sudah dilakukan serta beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan industri masing-masing.

Beberapa hal yang bias dicatat dalam laporan ini ialah:

- a). Dimanfaatkannya sisa-sisa potongan logam dari pembuatan pipa, cor logam dan lain-lain untuk pembuatan kerajinan anak-anak seperti keranjang parcel, tempat pot bunga dengan biaya tenaga kerja ukuran anak- anak.
- b). Pembuangan limbah yang masih sangat tradisional

2. Pembinaan terpadu

Dilakukan antara Departemen Perindustrian dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan bentuk pembinaan antara kedua instansi tersebut berlainan namun materi keduanya terpadu. Pada Departemen Perindustrian, pengusaha kecil walaupun tidak ada keharusan untuk mendaftar, tapi diarahkan untuk kepentingan usahanya agar pendataan di perindustrian terealisasi. Data tersebut sangat berarti dalam memperbandingkan dengan sejumlah data yang ada di kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

Sedangkan pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sumberdaya manusia (SDM) lebih ditekankan, khususnya dalam bentuk pelatihan (pembinaan secara fisik) sebagai tindak lanjut dari ceramah dan pembinaan terpadu.

3. Pelatihan

Pelatihan adalah:

Setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya.*

Pola pembinaan yang ada diawali dengan pelatihan mentalitas dasar dan sikap kerja 5 k ialah:

- ketertiban
- kerapian
- kebersihan
- kelestarian
- kedisiplinan

Paket pembinaan yang terdiri dari pelatihan mental dasar dan latihan fisik tersebut dilaksanakan selama 2 bulan di lingkungan industri kecil Takaru dengan PT Astra Mitra Ventura sebagai perusahaan pasangan usaha. Sasaran paket dasar pembinaan tersebut ialah:

- a. Mentalitas dasar, untuk mewujudkan mental karyawan yang mendasari cara berfikir dan bertindak dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, yang meliputi pengenalan diri dan fungsi organisasi perusahaan serta cara mewujudkan fungsi tersebut agar dapat lebih berkualitas serta pengenalan pengendalian tugas dan kepemimpinan.
- b. Sikap kerja 5k untuk mewujudkan tempat dan suasana kerja yang menyenangkan, sehingga tercipta peningkatan produktifitas, safety, quality

dan moral karyawan yang meliputi gerakan kebulatan tekad untuk mengadakan ketertiban (penilaian) ditempat kerja yaitu bagi barang- barang yang masih baik dan diperlukan, kemudian melakukan kerapihan(penataan) agar mudah dicaridan mudah diambil, dilanjutkan dengan kebersihan yang artinya membuang sesuatu (barang) yang sudah tidak diperlukan dan jagalah kondisi barang dalam suasana terbaik dengan melaksanakan pengecekan terus menerus dan penuh perhatian. Untuk selanjutnya memelihara kondisi yang mantap(keserasian dan standarisasi) untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik (kedisiplinan).

Mengenai pelaksanaan pembinaan dalam 5 bidang tersebut diatas (pemasaran, permodalan, organisasi dan manajemen, ketrampilan teknik produksi dan kemitraan) ialah:

1. Bidang Pemasaran

Bidang pemasaran yang nampak di Kabupaten Tegal diwarnai dengan sarana pembinaan dalam bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu UPT logam di lingkungan industri kecil "TAKARU" yang secara operasional pembinaan dilakukan di sentra-sentra. Disamping itu dilakukan program konsolidasi sebagai upaya pengkajian dan arah penetapan serta pengembangannya sehingga dengan demikian UPT akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui peningkatan berbagai aktivitas pelayanan antara lain :

- pengolahan data dan analisa produk industri kecil
- penerapan teknologi proses dan manufakturing
- desain dan engineering produk spesifik

- pendidikan dan latihan tenaga industrial
- informasi mengenai mesin atau peralatan-peralatan.

Sementara ini pemasaran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri, namun telah ada arahan pada industri maju dan mandiri dengan pola binaan inti plasma dengan program- programnya ialah:

- penyediaan informasi pasar, kelembagaan
- peningkatan promosi dan pameran
- kerjasama antar departemen
- pengembagangan system keterkaitan
- peningkatan kemampuan pengusaha dan pedagang ekspor.

Persiapan- persiapan ekspor ini diawali dengan adanya penerapan International Standart Organisation (ISO 9000), dengan tujuan peningkatan mutu product ekspor.

Bagi masyarakat awam ISO 9000 adalah suatu kumpulan pedoman berisi persyaratan industri yang bersifat teknis, merupakan dokumen unik yang dapat merupakan penerapan pada hampir semua kegiatan bisnis tanpa adanya keharusan mengubah dan mengganti proses produksi yang ada.

Menurut Nugroho dalam bukunya Internatinal Standart Organisation (ISO) 9000, yaitu :

“sistem yang menyangkut mutu dan manajemen serta tuntunan menuju penerapan system manajemen mutu dimana peranannya untuk melindungi konsumen agar dapat memperoleh produk yang mengacu pada perlindungan dalam hal kenyamanan kesehatan dan keamanan serta lingkungan. Sistem pendekatan ISO 9000 tidak bersifat teknis, akan tetapi berdasarkan pada pemikiran bahwa suatu produk yang baik atau yang bermutu dan selalu berada

dalam keadaan bermutu hanya dapat dicapai dengan adanya konsistensi pelaksanaan pada dua macam sistem tersebut”.²⁴

Pola binaan belum terlihat, karena program- program yang ada masih dalam tahap pembentukan dan proses awal dari penerapan ISO 9000 meliputi:

- pelatihan
- pembentukan lembaga akreditasi.

Sedangkan fasilitas yang ada berupa:

- moneter
- fiscal
- administrasi.

2. Bidang Permodalan

Dalam pola permodalan pengusaha kecil yang intinya ialah untuk peningkatan kemampuan permodalan pengusaha kecil baik akses terhadap sumber permodalan maupun perbaikan struktur permodalan, pengusaha kecil dapat memanfaatkan program-program permodalan atau perkreditan antara lain:

a. Modal awal

Merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada Pengusaha Kecil pemula yang belum mempunyai akses terhadap Bank. Modal awal akan disediakan dari Bank Indonesia sebagai modal bergulir dan akan diberikan secara langsung kepada Pengusaha Kecil

²⁴ Nugroho, S, Pengenalan ISO 9000 Series, 1997, hal. 32

atau kepada Koperasi yang anggotanya pengusaha kecil. Bidang Pemasaran

b. Modal Ventura

Penyertaan modal dalam usaha-usaha kecil yang memerlukan sekaligus memberikan pembinaan manajemen, pendidikan dan pelatihan. Disamping itu dalam mewujudkan Pengusaha Kecil/menengah yang tangguh pemerintah akan mendirikan perusahaan modal ventura bagi kepentingan Pengusaha Kecil yang kuat(maju). Untuk itu PT Bahana akan melaksanakan pembinaan Pengusaha kecil melalui penyertaan modal ventura.

c. Kredit Perum Pegadaian.

Pemberian pinjaman pada perorangan (pengusaha kecil) dengan gadai barang bergerak, yang terbagi dalam 2(dua) golongan,yaitu:

- Golongan pertama : antara Rp 5000,- sampai Rp40.000,- per orang
- Golongan kedua : antara Rp 40.000,- lebih sampai dengan 2,5 juta rupiah.

Perum Pegadaian dalam hal ini menjembatani kelemahan sektor industri kecil dalam menyerap fasilitas kredit perbankan yang diberikan pemerintah, pendekatannya lebih berani dengan tidak menahan jaminan yang produktif tapi cukup memungut uang sewa terhadap jaminan yang tidak ditahan tersebut.

d. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.(KKPA).

Bagi pengusaha kecil calon anggota dan anggota koperasi dapat memanfaatkan kredit KKPA untuk sektor perdagangan dan jasa terutama kredit investasi dengan maksimum kredit Rp50.000.000,- per anggota(pengusaha kecil).

e. Kredit Investasi.

Dimanfaatkan oleh pengusaha kecil untuk usaha PIR Trans,PSN, PR PTE, Pirbun dan KPR.

f. Kredit Usaha Kecil (KUK).

Dimanfaatkan oleh pengusaha kecil dengan jumlah maksimum kredit Rp.250.000.000,-

Disamping itu dalam upaya membantu pengusaha kecil yang tidak memiliki kemampuan akses perbankan, PT Askrido sebagai lembaga penjamin kredit dapat menjamin kredit bagi pengusaha kecil,yang tentu saja dengan prosedur yang mudah didapat serta tidak memerlukan uang tanggungan pribadi(pengusaha kecil tersebut).

3. Bidang Organisasi dan Manajemen.

Program ini termasuk program jangka panjang karena pengarahannya pada sumberdaya manusianya, dan untuk pendekatan pelaksanaannya pemerintah memberikan alternatif pengembangannya pada inkubator bisnis, yang sudah dikembangkan dinegara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.

"Business incubator is micro facility with as small management staff that provides the physial work space, shared facilities, and acces to technical and business support services in one integrated and affordable package"

Inkubator bisnis dapat dikembangkan sebagai salah satu model alternatif pengembangan Usaha Kecil yang dalam implementasinya dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Pemerintah (Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil serta instansi terkait lainnya), lembaga keuangan, dunia usaha terutama sektor usaha besar dan lembaga-lembaga lain yang menaruh perhatian terhadap keberadaan Usaha Kecil.

Dalam implementasinya, tugas incubator untuk membina dan mengembangkan usaha kecil secara berkelanjutan memerlukan dukungan organisasi, program dan dana. Dalam model ini Perguruan Tinggi sebagai sumber daya manusia diharapkan menjadi pelopor untuk mendirikan lembaga incubator bisnis seperti :

- mencari sponsor terutama sponsor lembaga-lembaga diluar negeri
- mencari Perguruan Tinggi yang mempunyai komitmen tinggi terhadap usaha kecil.

4. Bidang Ketrampilan Teknik Produksi.

Dalam peningkatan ketrampilan teknik produksi selain pengembangan industri yang telah ada juga perlunya alih teknologi dibidang industri yang termasuknya bidang desain. Desain industri diartikan dengan : “suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi”

Negara kita merupakan salah satu negara yang mempunyai tujuan dalam relokasi industri dan dalam menuju ke industri baru, Oleh karenanya pengakuan teknologi sangatlah penting dan salah satu cara untuk mempercepat menuju negara industri baru ialah alih teknologi. Alih teknologi bukanlah hanya sekedar mengoperasikan perlengkapan canggih, tetapi lebih dari itu, yaitu alih teknologi harus mencakup perancangan, rancangan, pengembangan, manufaktur, dan pemasaran

produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan harkat manusianya. Peningkatan ketrampilan pada manusia tersebut juga disesuaikan dengan perspektif sosio cultural khususnya pada masyarakat Tegal, dimana terdapat dua sisi pandang yaitu:

- a. sisi yang lebih peka karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia, sementara manusia ingin berkarya dengan peningkatan fisik (kemajuan teknologi secara nyata, perkembangan kreatifitas peralatan canggih dan sebagainya), namun harus diimbangi dengan hal-hal non fisik yaitu perwujudan dari kebutuhan sosio psikologis dalam masyarakat
- b. sisi pandang nilai-nilai budaya yang menentukan baik-buruknya wajar tidaknya, dan sekaligus menjadi barometer penilaian bagi seseorang. Nilai-nilai ini yang dalam masyarakat Tegal dicontohkan dengan siapa cikal bakal pendiri perusahaan tersebut (sejarahnya), bagaimana pengelolaan awal (falsafah pembentukan perusahaan) dan sebagainya. Corak-corak khas seperti ini pada gilirannya nanti akan berkembang lebih maju dengan penanganan secara baik dan benar melalui manajemen sumber daya manusia.

5. Bidang Kemitraan

Salah satu usaha untuk mendorong sector usaha kecil adalah melalui kemitraan usaha yaitu antara sector usaha kecil dan menengah dengan sector usaha besar, dimana prinsip kerjasamanya dilakukan atas dasar saling membutuhkan. Untuk bermitra usaha sector usaha kecil harus dapat menyelesaikan terlebih dulu masalah-masalah internalnya (bahan-bahan bakunya misalkan besi lempeng, besi cor dan sebagainya). dan sector usaha besar menentukan standar dan spesifikasi teknis berdasarkan bahan baku atau komponennya. Dengan adanya pola keterkaitan seperti ini dapat dihindari

mata rantai produk yang dimonopoli oleh pengusaha besar mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan proses produksi bahkan sampai pada pemasarannya.

Prinsip Kemitraan didasarkan pada pasal 26 UU No 9 Tahun 1995 ialah:

1. Usaha Menengah dan usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
2. Pelaksanaan hubungan kemitraan diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha,
3. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi.
4. Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai hubungan hukum yang setara.

Kemitraan adalah hubungan usaha biasa antara usaha besar dengan usaha kecil disertai bantuan pembinaan berupa:

- peningkatan sumber daya manusia
- peningkatan pemasaran
- peningkatan teknik produksi
- peningkatan modal kerja
- peningkatan kredit perbankan ²⁵

Adapun tujuan program kemitraan ini bisa kita perinci menjadi :

²⁵ Soeharto Prawirokusumo, Ekonomi Rakyat, UGM Yogyakarta 2001, 173

a). Tujuan structural:

- terjalinnya hubungan usaha yang erat antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil berdasarkan Saling butuh, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- menciptakan nilai tambah, efisiensi dan produktifitas usaha bagi kedua pihak dan selanjutnya akan memperkuat ekonomi dan industri nasional;
- menciptakan dan meningkatkan alih pengetahuan, ketrampilan manajemen dan teknologi.

b). Tujuan kultural

Mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasi nilai- nilai baru dalam berusaha (budaya agraris industrial) seperti:

- perluasan wawasan, prakarsa dan kreatifitas;
- berani mengambil resiko;
- etos kerja;
- kemampuan aspek-aspek mmanajerial;
- bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan kedepan;

Salah satu usaha untuk mendorong sector usaha kecil dan menengah dengan sector usaha besar dimana prinsip kerjasamanya dilakukan atas dasar saling membutuhkan. Untuk bermitra usaha sektor usaha kecil harus dapat menyelesaikan terlebih dulu masalah- masalah internalnya (bahan-bahan baku seperti bwesi lempeng, besi cor dan sebagainya), kemudian sector usaha besar menentukan standar dan spesifikasi teknis berdaasarkan bahan baku atau komponennya. Dengan adanya pola keterkaitan seperti ini dapat dihinari mata rantai produk yang dimonopoli oleh pengusaha besar mulai dari

penyediaan bahan baku sampai dengan proses produksi bahkan sampai pada pemasarannya.

Mitra Usaha yang telah dilaksanakan di Tegal adalah dengan PT Astra Ventura

Program Peningkatan Kewiraswastaan

Program ini berpijak pada suatu metodologi Achievement Motivation Training (AMT) yang dikembangkan oleh Prof. Dr. D. C. Mc Clelland. Metode ini lama dikembangkan khususnya di negara-negara seperti India, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Serikat. Aplikasi metode tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan jangka panjang di negara yang sedang membangun khususnya bidang industri.

Program Peningkatan Kewiraswastaan di Indonesia

Di Indonesia ruang lingkup bidang ini meliputi latihan pengembangan motivasi berusaha, peningkatan ketrampilan dalam wiraswasta dan pemecahan masalah-masalah industri. Dengan demikian dalam pemberian pelatihan-pelatihan tersebut diperlukan :

Keikutsertaan/partisipasi yang terbatas pada industri kecil tertentu dengan harapan

- Mempunyai kemungkinan pemasaran yang cukup luas.
- Mempunyai kemungkinan jaminan di bank.
- Memungkinkan program tindak lanjut.

Program Kewiraswastaan di Tegal

Pada latihan kewiraswastaan industri kecil dimungkinkan adanya penelusuran dan pembahasan kasus-kasus yang banyak dialami oleh pengusaha antara lain:

- partisipasi pihak-pihak tertentu dalam rangka mendapatkan data / informasi bank
- kriteria dan syarat bantuan untuk usaha industri kecil memungkinkan diaktifkannya suatu wadah kerjasama antar instansi dalam mengembangkan industri kecil.
- kemantapan mengenai pelayanan industri yang diberikan pada usaha industri kecil sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Disamping hal tersebut, program Kewiraswastaan ini telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kejuruan pada Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) yang berlokasi di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Pada kurikulum Pendidikan Sistem Ganda (PSG) siswa dititipkan pada Industri Kecil yang telah diklasifikasikan kedalam kelompok Industri Kecil berpola pendidikan, artinya industri mana merupakan pengembangan dari pola daerah yang ada yang disesuaikan dengan sistem ganda disekolah kejuruan. Sistem ganda tersebut ialah:

- praktek ketrampilan pada industri.
- pengenalan pendidikan sekolah dalam dunia industri dan masyarakat.²⁶

Pada praktek ketrampilan indutri yang ditunjuk dalam hal ini ialah:

1. PT Estika Pulau Mas untuk kria kayu
2. PT Matahari Putra, untuk kria logam, dan
3. Dinar Collection, untuk kria tekstil.

²⁶ Keputusan Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah No 421/0340 tentang kurikulum pendidikan SMIK

Sedangkan pengenalan pendidikan sekolah pada industri berupa:

1. Sosialisasi pelajaran-pelajaran sekolah pada masyarakat.
2. Penyuluhan siswa pada kelompok-kelompok dasa wisma di lingkup Kabupaten Tegal.

Kewirausahaan.

Pasal 14 huruf c UU No 9 Tahun 1995 mengatakan bahwa: “ Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang sumberdaya manusia”. Kemudian ditegaskan didalam pasal 17 huruf a bahwa: “Dalam melakukan pembinaan dalam bidang sumberdaya manusia yaitu antara lain dengan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan”.

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dalam konteks wirausaha di Indonesia sosok wirausahawan yang diharapkan ialah yang memiliki jiwa, semangat, serta perilaku yang ada dalam sumberdaya manusia yang dimilikinya mulai dini ditambah dengan proses belajar mengajar dalam arti sempit serta dengan pengembangan fungsi sumberdaya manusia sesuai dengan arahan dan perkembangan kondisi yang ada. Soeharto Prawirokusumo memberi artian tentang jiwa, semangat serta perilaku adalah:

1. kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian;

2. kemauan dan kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis;
3. kemauan dan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif;
4. kemauan dan kemampuan untuk bekerja secara teliti, tekun dan produktif;
5. kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berlandaskan etika bisnis yang tepat.

27

Gerakan ini diadakan atas kehendak Pemerintah dalam meningkatkan usaha para Pengusaha Kecil untuk mencapai peningkatan kesejahteraan.

Tujuannya adalah:

- Menumbuhkan kesadaran dan orientasi Kewirausahaan yang kuat kepada masyarakat.
- Meningkatkan jumlah Wirausaha yang berkualitas, handal, tangguh dan unggul.
- Mewujudkan kemampuan dan kemandirian para Pengusaha untuk dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil serta koperasi pada khususnya.
- Membudayakan semangat, sikap dan perilaku serta kemampuan kewirausahaan dikalangan masyarakat, terutama kepada generasi muda sehingga kemampuan menjadi wirausaha yang handal, tangguh dan unggul.

Program kegiatan kewirausahaan (ruang lingkup program GNMMK)

Program ini berdasar pada keputusan kepala kantor wilayah Departemen Koperasi Jawa Tengah no. 1748/ KwK/II/VIII/1996 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kewirausahaan daerah tingkat 1 Jawa Tengah.

²⁷ Soeharto, op.cit..., 133

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jawa Tengah selaku Ketua Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil No 990a/KWK.II/VI/1996 tentang Kelompok kerja Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi.

Pelaksanaan kegiatan ini diupayakan dengan pembentukan Klinik Usaha yang tugasnya membantu kelompok kerja kewirausahaan dengan sasarannya adalah pra pengusaha.

Adapun tugas klinik usaha tersebut ialah:

- menghimpun, mencatat, mengidentifikasi dan mengolah permasalahan yang dihadapi masyarakat pra pengusaha, pengusaha kecil dan koperasi.
- Memberikan konsultasi tentang masalah dan kendala yang dihadapi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat pra pengusaha, pengusaha kecil dan koperasi.²⁷

Mengenai susunan keanggotaan klinik usaha terdiri dari:

- Kepala Balai Latihan Koperasi Jawa tengah (sebagai ketua). Sedangkan anggota-anggotanya adalah:
- Kepala Bidang Pembinaan Pengusaha Kecil
- Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Perkotaan
- Universitas Diponegoro Semarang
- Ikatan Akutansi Indonesia Jawa Tengah
- Kepala Duta Karya Jawa Tengah.

Hal yang menarik disini yaitu diikuti sertakannya Perguruan Tinggi dalam susunan keanggotaan klinik usaha, dengan maksud untuk lebih mengefektifkan kegiatan

²⁷ Keputusan kepala kantor departemen Koperasi Jawa Tengah

konsultasi pra pengusaha untuk menjadi pengusaha, khususnya pada pelaksanaan ketentuan- ketentuan yang tertulis dibidang aturan- aturan.

Pelaksanaan kegiatan usaha di daerah juga mengikutsertakan keanggotaan dari Perguruan Tinggi setempat yaitu Universitas Pancasakti Tegal sebagai Perguruan Tinggi yang ada di Kotamadya Tegal. Susunan keanggotaan klinik usaha di kabupaten Tegal adalah sbb :

- Ketua : Kepala Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil KandeKoperasi dan PPK Kabupaten Tegal.
- Anggota;
 1. Kepala Seksi Koperasi
 2. Kepala Seksi Koperasi dan PPK Kabupaten Tegal
 3. Kepala Seksi Industri Kecil Perindustrian Kabupaten Tegal
 4. Kepala UPT LIK Kabupaten Tegal
 5. Universitas Pancasakti Tegal

Dengan demikian terlihat bahwa peran Perguruan Tinggi sangat penting artinya dalam menyelaraskan Kewirausahaan, dan sudah saatnya Pendidikan Tinggi Indonesia menjadikan pendidikan Kewirausahaan sebagai satu disiplin ilmu yang mandiri, karena:

1. Kewirausahaan adalah alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pendapatan (wealth creation process).
2. Kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata yang ada teori, konsep dan metode yang ilmiah.

3. Ada dua konsep dalam kewirausahaan yaitu venture start up dan venture growth tidak dapat masuk dalam frame work general management cources yang memisahkan antara management dan business ownership.

Disamping itu Perguruan Tinggi merupakan tempat untuk kreativitas dan inovasi.

Pengembangan ilmu dan teknologi,tempat penelitian dan hasil penelitian serta tempat untuk menjadikan sarjana – sarjana wirausahawan.

Program Pemberdayaan Industri Kecil Menengah dan Pedagang Industri Kecil.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi hal yang luar biasa dengan adanya krisis moneter yang menimbulkan krisis ekonomi, bahkan membawa dampak yang sangat besar terhadap semua bidang kegiatan nasional khususnya pada perkembangan perekonomian nasional. Nilai rupiah terdepresi sebesar 82,5% . Suku bunga komrial yang mencapai 65% telah menyebabkan lonjakan harga bahan pangan dari dan bahan baku untuk industri sehingga menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi yang diperkirakan akan mencapai 100% pada akhir tahun. Peran Pemerintah sangatlah penting terutama dalam mencegah ,mengendalikan serta mengarahkannya sesuai dengan ideologi pasal 33 UUD 1945 sebagai tolak ukur penguasaan sektor ekonomi oleh negara. Secara lebih khusus tersedia pola pada UU no. 19/ Prp/ th. 1960 dan UU no. 9/ Prp/ th. 1969 serta kebijaksanaan pemerintah dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya krisis moneter tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan Industri Kecil dan Menengah serta peluang pedagang kecil dan menengah menutup usahanya yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja sehingga banyaknya pengangguran yang ada. Selain dampak terhadap indutri kecil, krisis

moneter juga berdampak pada pedagang kecil. Modal kerja untuk pengadaan barang sebelum terjadi krisis moneter umumnya dapat dilakukan secara konsinyasi atau dibayar mundur, namun setelah krisis harus dibayar tunai. Hal ini yang mengakibatkan kebutuhan akan modal kerja bertambah juga adanya penurunan daya beli masyarakat sehingga omzet pedagang kecil juga mengalami penurunan secara drastis. Dalam kondisi yang demikian terlihat pemerintah melindungi rakyat kecil dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Program yang tepat dalam hal ini ialah pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) dan pemberdayaan Pedagang Kecil Menengah (PKM)

Industri Kecil Menengah adalah industri kecil dalam bentuk usaha individual maupun kelompok. Industri dalam bentuk kelompok apabila jumlah minimal anggotanya terdiri dari 10 orang, sedangkan kriterianya antara lain :

- Memiliki asset antara 5 s/d 20 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan.
- Usaha agroindustri potensial ekspor.
- Industri kerajinan potensial ekspor.
- Industri substitusi impor.
- Industri yang mendukung pertanian, kerajinan dan substitusi impor.
- Diutamakan industri yang menggunakan bahan baku dalam negeri.
- Memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Sedangkan Pedagang Kecil Menengah (PKM) adalah pedagang eceran secara individual atau dalam bentuk kelompok sebagai Kelompok Usaha Bersama Pedagang Eceran Kecil (KUB PEK), dengan kriteria sebagai berikut:

- memiliki asset maksimal Rp 25 juta, tidak termasuk tanah dan pekarangan.
- pedagang eceran kecil dengan tempat usaha tetap dan atau yang terkena PHK yang memiliki surat keterangan tempat usaha dari pejabat yang berwenang (kepala pasar/lurah)
- telah berusaha ditempat tersebut
- berusaha dibina secara kelompok
- memenuhi syarat- syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pedagang eceran kecil yang menjadi sasaran program ini ialah kelompok usaha bersama pedagang eceran kecil dengan minimal 10 pedagang .

Dasar hukum adanya Pemberdayaan Industri Kecil dan Pedagang Kecil Menengah ialah SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 449.1./MPP/10/1998,26-10-1998. Dengan SK tersebut diharapkan industri kecil semakin meningkat dalam pelaksanaan pengembangannya, karena Pemerintah bersama Lembaga masyarakat , konsultan profesional telah mencanangkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang salah satu bentuk kegiatannya adalah Proyek Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Pemberdayaan IKM ini dengan cara memberikan bantuan langsung dan bantuan tidak langsung. Bantuan langsung berupa bantuan modal untuk pembelian bahan baku dan investasi untuk pengadaan peralatan dan mesin pendukung. Mekanisme bantuan tersebut dilakukan melalui modal bergulir kepada IKM untuk jangka waktu 2 tahun. Sedangkan bantuan tidak

langsung berupa bantuan unit usaha , unit percontohan, bantuan unit pelayanan teknis , bantuan promosi dan pemasaran, bantuan pelatihan dan magang.

Adapun pelaksanaan Penyaluran Bantuan Modal adalah:

a). Tatacara penyaluran bantuan modal

Aplikasi bantuan modal dilampiri dengan proposal kelayakan usaha disampaikan pada pimpinan bagian proposal yang tembusannya disampaikan pada tim teknis Dati I.

Tim teknis Dati I (menugaskan pada konsultan) melakukan analisa, memberikan rekomendasi tentang kelayakannya.

Besarnya bantuan modal maksimal Rp 50.000.000,- tiap proposal.

I.K.M. dikenakan biaya pembinaan sebesar 10% tiap tahun dari besarnya bantuan modal.

b). Tatacara Pengembalian Bantuan :

Jangka waktu pinjaman bantuan modal ditetapkan maksimal 2 tahun dengan masa tenggang waktu 3 bulan untuk KUB-PEK dan 6 bulan untuk IKM.

IKM dan KUB-PEK mengembalikan /mencicil pinjamannya kepada tim teknis Dati I melalui BRI setempat.

Pengembangan Sektor Industri.

Peranan sub sektor industri kecil dan rumah tangga relatif cukup besar , karena sektor indutri di Kabupaten Tegal khususnya kelompok industri logam mesin dan elektronika telah memberi andil sebesar 24,64% dari jumlah industri yang ada.

Dari catatan kantor Perindustrian, pada tahun-tahun terakhir ini selalu ada peningkatan, sebagai contoh pada tahun 1997 , jumlah industri yang ada sebesar 129.178 , telah meningkat sekitar 8,96 % dari tahun 1996 (yaitu 118,770 industri), sehingga nilai tambah sektor industri tahun 1997 telah mencapai 31,796 milyar.

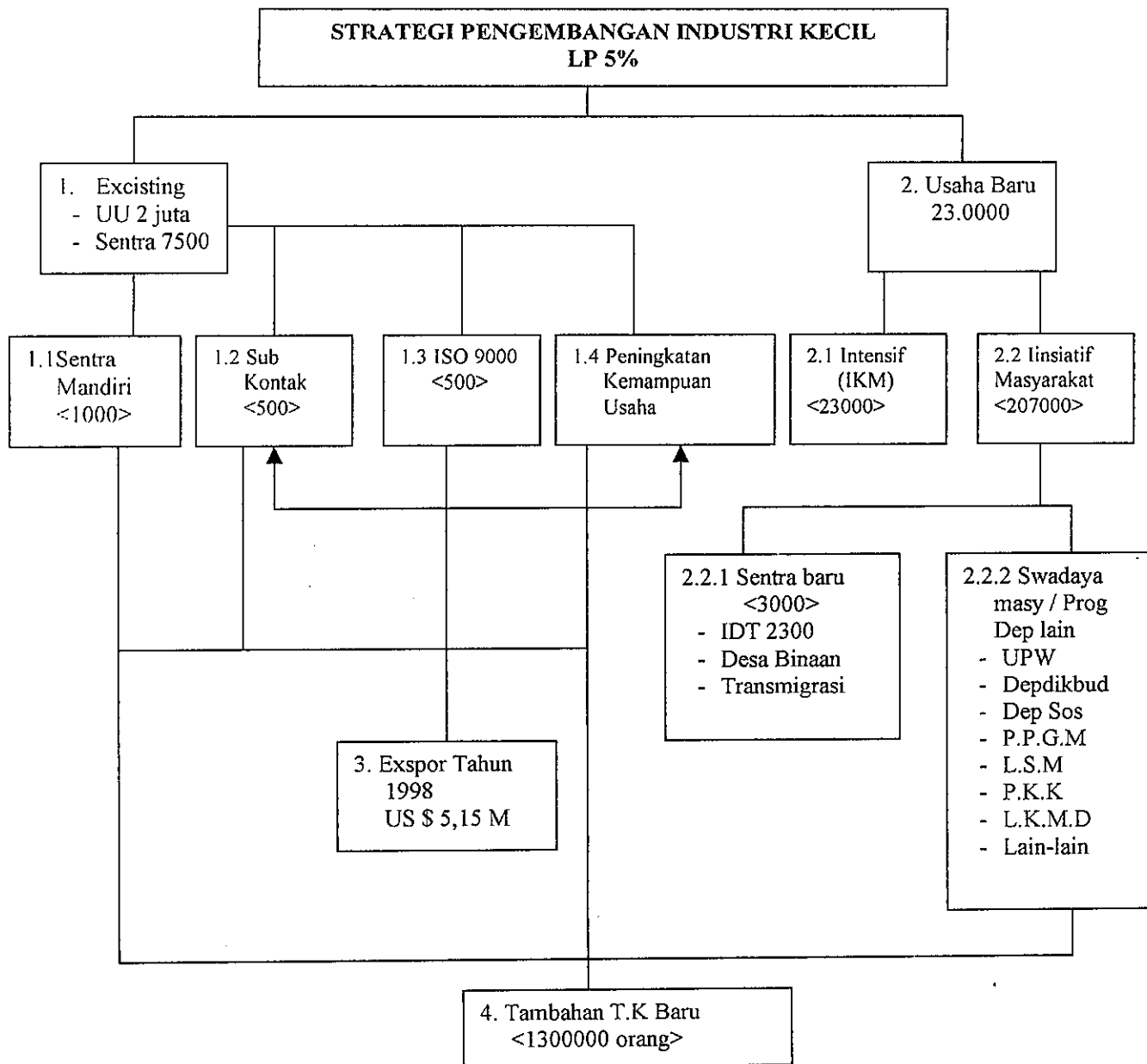
Sedangkan untuk industri kecil peningkatan jumlah unit usaha dan kesempatan bidang usaha untuk menambah jumlah tenaga kerja bias kita gambarkan dengan angka dibawah ini.

Mulai tahun 1995 sampai dengan 1997 dengan jumlah usaha yang ada serta tambahan tenaga kerja baru sesuai dengan strategi pengembangan industri kecil

Tahun	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja
1995	2950	13247
1996	2953	13318
1997	2981	14058

Sumber: Dept.Perindustrian , laporan, Kab Tegal.

Untuk lebih memperjelas pengembangan tersebut maka bias kita bandingkan dengan Target Pengembangan di Jawa Tengah pada (bagan didepan), serta pada Strategi Pengembangan Industri Kecil (bagan dibawah ini).



Dari data tersebut diatas terlihat bahwa Unit Usaha yang sudah ada sebanyak 2juta, dalam strategi pengembangannya Usaha Kecil di Tegal pada tahun 1998 telah ikut andil sebesar 5% dalam total Usaha Nasional. Ada 2 macam keberadaan Industri Kecil :

1. Industri yang sudah ada dan sudah diakui sebesar 7500 unit usaha terdiri dari :
 - sentra mandiri sebanyak 1000
 - sub kontrak sebanyak 500
 - yang sudah mendapat standart ISO 9000 sebanyak 500
 - sedangkan sisanya sebanyak 5500 merupakan peningkatan kemampuan usaha, yang berkaitan dengan sub kontrak, hubungan kemitraan serta peoses peningkatan dari usaha kecil menjadi industri jndustri kecil menengah.
2. Industri masyarakat sendiri yang belum berizin sebanyak 230.000 unit

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Industri Kecil merupakan bagian yang penting dalam perkembangan negara disektor ekonomi, karena bidang yang kecil tersebut jangkauan yang besar khususnya disektor informal.

1. Industri kecil diartikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan sesuai yang ditentukan dalam aturan perundangan yaitu:
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah
 - memiliki hasil penjualam tahunan paling banyak 1 miliar rupiah
 - milik warga Negara Indonesia
 - berbentuk badan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum.
 - berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar.

Pengusaha yang bergerak dibidang Industri Kecil dinamakan Pengusaha Kecil, termasuk didalamnya ialah :

- pengusaha dalam pembuatan alat-alat rumah tangga
 - pengusaha pengrajin
 - pengusaha cor besi
 - pengusaha perabot / perlengkapan rumah tangga
 - pengusaha perbengkelan.
2. Pengusaha Kecil merupakan kelompok yang besar dikawasan industri, sehingga Pengusaha Kecil perlu diperhatikan dalam lingkup geraknya, karena kehadiran Pengusaha Kecil cukup mendatangkan berbagai kesempatan / kegiatan dalam berbagai bidang seperti:

- perkoperasian
- perdagangan
- perindustrian
- tenaga kerja

3. Pembinaan mengandung pengertian :

- a. Pengertian berdasarkan ketentuan perundangan ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- b. Pengertian secara implementatif dikaitkan pada perkembangan dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang menyelaraskan aspek dibidang ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan upaya- upaya sebagai berikut:
 - bidang perkoperasian
 - bidang pemberdayaan industri kecil
 - bidang kemitraan
 - bidang ketrampilan teknik produksi
 - bidang permodalan
 - bidang manajerial atau sumberdaya manusia(SDM).

4. Pemerintah lewat Instansi-instansi terkait seperti Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian,Departemen Koperasi seta Perbankan telah memberi kesempatan berkembang pada para Pengusaha Kecil dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan yang kesemuanya pada prinsipnya mengangkat dan memberi kesempatan seluas-luasnya pada Industri-industri kecil khususnya pada Penusaha Kecil untuk lebih berkembang dalam rangka mencapai kesejahteraannya serta kemakmuran masyarakat Indonesia pada umumnya.

5. Dalam rangka pelaksanaan pembinaannya, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan- kebijaksanaan dimana kebijaksanaan tersebut berupa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Walikota, Bupati serta kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Instansi-instansi terkait, disamping juga kebijakan-kebijakan yang tidak tertulis sebagaimana pelaksanaan yang ada, khususnya yang langsung berkenaan dengan masyarakat industri.
6. Kabupaten Tegal sebagai daerah penelitian mempunyai potensi yang besar dalam perindustrian, dimana pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang industri juga merupakan pengusaha yang turun- temurun dengan bekal falsafah bahwa mental pedagang yang hidup di keturunannya jangan sampai putus, juga pola budaya setempat yaitu selalu sabar, narima, dan kebersamaan antar pengusaha , sehingga terlihat bahwa setiap perkampungan pada umumnya mengusahakan industri- industri semacam dan mereka saling gotong-royong dalam menghadapi permasalahan serta dalam kesamaan pemasarannya.
7. Sasaran Pembinaan Pengusaha Kecil secara kualitatif dan kuantitatif secara umum sudah terlaksana, dua hal dalam pembinaan yang belum terlaksana ialah:
 - kemampuan meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.
 - Kemampuan meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna, walaupun ada beberapa pengusaha yang sudah dianggap mampu namun belum mencapai kriteria yang ada, diantaranya ialah budaya tepa selira yang berkembang dalam masyarakat dan factor ketergantungan dengan perusahaan lain.
8. Dampak segera atau hasil awal yang didapat dengan adanya pembinaan dari Pemerintah adalah dengan bertambahnya unit-unit usaha khususnya usaha keluarga yang terlihat mulai ada peningkatan awal (18,48%) untuk periode 3 tahun (1993 – 1995).

9. Peningkatann dan pengembangan industri kecil yang terlihat di Kabupaten Tegal meningkat sebagai akibat dari upaya pemerintah yang antara lain adalah:
- mengkoordinasikan antara pengusaha kecil dengan pengusaha kecil, pengusa kecil dengan mitra usaha (PT Astra Ventura misalnya), serta antara instansi- instansi terkait dengan Pembinaan Pengusaha Kecil (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil).
 - Menyusun konsep awal dalam membudayakan Lembaga Kewirausahaan.
 - Diterapkannya International Standard Organization (ISO 9000) sebagai persiapan- persiapan ekspor.
10. Dampak akhir atau hasil nyata yang didapat dengan adanya pembinaan dari Pemerintah adalah :
- a. Tumbuhnya industri kecil yang mandiri dan tangguh dengan|
 - peningkatan teknik produksi,
 - pelaksanaan alih teknologi,
 - peningkatan hasil produksi,
 - peningkatan pemasaran.
 - b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dengan|:
 - peningkatan sumberdaya manusia,
 - pelaksanaan managerial secara bertahap.
11. Pada akhirnya Pemerintah telah mengarahkan pada pengembangan inkubator bisnis sebagai model alternatif pengembangan usaha kecil yang dalam implementasinya dapat melibatkan Perguruan Tinggi dan Pemerintah (Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil), lembaga keuangan, dunia usaha terutama sektor usaha besar dan lembaga- lembaga lain yang menaruh perhatian terhadap keberadaan usaha kecil.

B. SARAN

1. Pentingnya mitra binaan yang bisa menyelaraskan bentuk-bentuk pembinaan pada Pengusaha Kecil, sehubungan pembinaan yang ada masih terlalu formal yaitu pembinaan dari pemerintah pada masyarakat yang dirasakan sebagai satu instruksi penegakan disiplin serta memakan biaya.
2. Inkubator bisnis perlu ditanamkan dalam pengembangan kewirausahaan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dalam menentukan konsep budaya Pengusaha Kecil yang ada di Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Sri Woelan, 1966, Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia, Penerbit Citra Media, Surabaya.
- Arikunto, 1992, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Gramedia, Jakarta.
- Bachtiar Rifa'i HTB, 1986, Perspektif Dari Pengembangan Ilmu dan Teknologi, Gramedia, Jakarta.
- Badruzaman Mariam Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo, Mustopa Didjaja, 1995, Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Brannen Julia, Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc., New Jersey, USA.
- Dimiyati Hartono, 1978, Pengembangan Dan Perlindungan Pengusaha Kecil, Mutiara Jakarta.
- Daliyo, 1995, Pengantar Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Indonesia.
- Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah, Kebijaksanaan Pengembangan Industri Kecil dalam Pembangunan Pelita VI, 1966.
- Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar BM Van Hoeve, PT Dai Nippon Gakarya Printing, Jakarta.
- Friedman W., 1990, Teori dan Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan), Rajawali Press, Jakarta.
- , 1990, Teori dan Filsafat Hukum (Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer), Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady Munir, 1997, Pembiayaan Perusahaan Masa Kini, (Tinjauan Hukum Bisnis), Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Go Marcel, 1992, Manajemen Group Bisnis, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Hadhikusuma Sutantya, Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, 1991, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartono Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad XX, Alumni, Bandung.
- Hadi Sutrisno, 1973, Metodologi Riset, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Himawan, Charles, 1973, Business Law (Contracts And Business Associations), Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Ibrahim, 1997, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ibnu Syamsu, 1983, Kebijaksanaan Keuangan Negara, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Irfan Islamy M., 1994, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil Cst, 1986, Pokok-pokok Hukum Perindustrian, Indhill, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1987, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Martosoewignjo Sri Soemantri (Editor Philipus M. Hadjon), 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada Press, Jakarta.
- Mohammad Thoyibi, 1998, Tehnologi Industrialisasi, Muhamnmadiyah University Press, Surakarta.
- Maryatmo. R, Y. Sri Susilo, Dari Masalah Usaha Kecil Sampai Masalah Ekonomi Makro, (Kumpulan Tulisan), 1996, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Moempoeni Martojo, Politik Hukum Dalam Sketsa, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Muslimin Amrah, 1985, Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung.
- Nugroho S., 1997, Pengenalan ISO 9000 Series dan Seri SNI 19. 9000-1992 versi 1987 dan 1994, Penerbit Abdi Tandur, Jakarta.

- Olson Dean (Terjemahan Koes Partono), tanpa tahun, Dasar Pengembangan dan Pengelolaan Perusahaan Kecil, PT. Patna, Bandung.
- Pangaribuan Emmy, 1994, Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern), Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Parker SR, Brown RK, Child J. Smith, 1992, Sosiologi Industri, Bhineka, Jakarta.
- Prawirokusumo, Soeharto, 2001, Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rouland Norbert (Terjemahan Paul W. Suleman), 1992, Antropologi Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
- , 1977, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu-ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- , 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Angkasa, Bandung.
- , 1996, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Soekamto, Soerjono, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Siagian, Sondang, 1988, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Soemitro, Ronny H, 1992, Study Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.
- , 1984, Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat, Alumni, Bandung.
- , 1990, Studi Hukum Masyarakat dan Teknologi, Agung Press, Semarang.
- , 1984, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1985, Beberapa Masalah dan Study Hukum dan Masyarakat, Remadja Karya, Bandung.
- Sastrosoehardjo, Soehardjo, 1990, Konstitusi dan Demokrasi Beberapa Pemikiran Tentang Hukum, Dahura Prize, Semarang.
- , 1981, Kekuasaan Keempat (Pengenalan Ulang), Yayasan Dharma Bakti, Semarang.

- , 1982, Hukum Administrasi Negara, Pokok-pokok Pemikiran serta Pengembangannya di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum.
- Sudjana Nana, 1991, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Baru, Bandung.
- Sunggono Bambang, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Smelser, 1984, Sosiologi Ekonomi, Wirasari.
- Sumantoro, 1983, Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang Dan Implikasinya Di Indonesia, Alumni, Bandung.
- , 1989, Hukum Ekonomi, Alumni, Bandung.
- Siti Soetami, 1993, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1994, Perusahaan Kelompok, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sanusi Bintang Dahlan, 2000, Pokok-pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Singgih Wibowo dkk, 1988, Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sudaryono, 1994, Koperasi Alternatif Pembinaan Usaha Kecil, Cermin (Majalah Kampus Universitas Pancasakti Tegal), Tegal.
- Gomes, FC, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi offset, Yogyakarta.
- Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- William N. Dunn (suntingan Muhadjir Darrwin), 1999, Analisa Kebijakan Publik, Haninditya Graha Widya, Yogyakarta.
- Wibowo, Singgih, 1988, Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil, Penebar Swadaya, Swadaya.

Hasil Penelitian

Hasil Evaluasi Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 1999 – 2000. Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Tegal dengan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Karya Sakti Tegal.
Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Di Kabupaten Dati II Tegal, 1997, Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Makalah

Kebijaksanaan Pemerintah Di Bidang Perindustrian, Makalah disampaikan dalam Seminar Regional “TEGAL JEPANGNYA INDONESIA”, Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Tegal, 1998.

Latief Abdul, Salah Pengangguran Dan Pemecahannya Di Indonesia, makalah disampaikan pada Kongres ISEI 21 – 23 November 1993 di Surabaya.

Soehardjo SS, Politik Hukum Dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1994.

-----, Pendekatan Dan Model Kebijakan, 1994.

Budiyono, Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pembinaan Sektor Informal Dalam Menunjang Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah, disampaikan pada Seminar Menyerap Informasi Pembangunan Daerah tanggal 17 Februari 1990, Tegal.

Hadisuprpto Paulus, Makalah dalam LKJKI 26 Oktober 1990, Fakultas.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 60/KMK.016/1996 tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK/1994 tentang

Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jendral, Jakarta, 1995.

Keputusan menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 497.1/MPP/Kep/10/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 518/164/1994
Tentang Forum Koordinasi Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Keputusan Bupati No. 501/1539/1995.

Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Kabupaten Dati II Tegal No. 1678/KDH.11.7/PPK/IX/98 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Kewirausahaan Kabupaten Tegal.

Majalah / Surat Kabar

Buletin Yayasan Dharma Bhakti Astra Edisi No : 15 Tahun ke IV Mei 1995.

-----, No. 13 Tahun ke II Desember 1995.

Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum No. 9 Tahun 1994.

-----, No. 5 Tahun 1995.

-----, No. 6 Tahun 1994

Forum No. 7/th XXIII/1995

Harian Republika, 19 September 1995

-----, 27 September 1995

Harian Suara Merdeka, 10 Juni 1998.